

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan

Permasalahan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu adanya perbedaan antara kinerja yang ditargetkan dengan yang terjadi sehingga harus dilakukan penyelesaiannya. Dalam penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten 2017-2022, kerangka yang harus dipahami oleh pemangku kepentingan tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang didefinisikan merujuk dari Bab 2 tentang gambaran kondisi umum daerah yaitu kinerja pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya, kemudian membuat capaian kinerja baru dan kinerja pembangunan yang belum tercapai, serta berusaha dicapai pada periode berikutnya.
2. Tema permasalahan yang diangkat berasal dari urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan.
3. Permasalahan disampaikan dalam deskripsi pernyataan dan didukung dengan indikasi perangkaan yang menjadi perbedaan antara yang terjadi saat ini dengan yang hendak dicapai dalam periode lima tahun.
4. Permasalahan yang disampaikan harus memiliki hubungan logis dan rasional untuk dapat diselesaikan melalui pernyataan dalam indikator kinerja utama yaitu sesuatu yang akan dirubah, outcome yaitu sesuatu yang akan dicapai, dan output yaitu sesuatu yang akan dikerjakan.
5. Permasalahan yang diselesaikan melalui indikasi pencapaian indikator kinerja utama dalam ruang lingkup struktur, tugas

pokok dan fungsi yang terkait. Setiap tingkatan struktur, baik itu tingkat eselon satu, eselon dua, eselon tiga dan eselon empat, mengemban penyelesaian permasalahannya dengan indikasi pencapaian indikator kinerja utamanya. Karenanya setiap tingkatan eselon harus tahu dan memahami benar, untuk apa keberadaan dan fungsi Perangkat Daerah, tugas dan fungsi kepala Perangkat Daerah, tugas dan fungsi kepala bidang, tugas dan fungsi kepala seksi/kasubag terhadap masalah-masalah yang baru, masalah yang belum selesai pada periode sebelumnya dan antisipasi masalah baru pada periode yang akan datang, dengan melihat pada Bab II Gambaran umum Kondisi Daerah, pencapaian kinerja kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

6. Pada Bab II Gambaran umum kondisi daerah, pada pencapaian data indikator kinerja kesejahteraan masyarakat, pencapaian data indikator kinerja pelayanan umum dan pencapaian data indikator kinerja daya saing, merupakan data hasil capaian kinerja periode RPJMD Provinsi Banten periode 2012-2017, yang menjadi dasar RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022 pada target indikator kinerja utamanya.

Fungsi penetapan indikator kinerja utama pada sebuah urusan merupakan cara mengindikasikan solusi penyelesaian suatu permasalahan setelah melalui proses identifikasi dengan cermat terhadap permasalahan urusan tersebut. Identifikasi permasalahan tergambar dengan deskriptif dan perangkatannya yang merujuk pada Bab II disetiap urusan pelayanan, harus menjadi tanggung jawab dan sangat dipahami Perangkat Daerah pada tingkat kepala Dinas, Kepala Badan, Kepada Bidang/Bagian sampai Kepala Seksi/Kasubag, sehingga setiap tingkatan struktur Perangkat Daerah tersebut mengemban indikator kinerja utamanya merupakan indikasi penyelesaian permasalahan pada urusan pelayanan selama periode RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022.

Pentingnya setiap tingkatan struktur Perangkat Daerah memahami permasalahannya dan mengemban indikator kinerja utamanya, yang merupakan indikasi penyelesaian permasalahan urusan pelayanan karena akan sangat terkait pada capaian kinerja RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022 yaitu:

Keterkaitan pemahaman capaian kinerja daerah yang menjadi rujukan identifikasi permasalahan pada Bab II, kemudian dirumuskan permasalahannya pada Bab IV, dirumuskan visi, misi, tujuan sasaran pembangunan sebagai indikasi prioritas solusi permasalahan dalam pembangunan pada Bab V, dan ditetapkan arah kebijakan serta indikator kinerja utamanya pada Bab VI, kemudian permasalahan diselesaikan dengan program pembangunan daerah beserta indikator kinerja utamanya, kemudian dilakukan penataan program pembangunannya pada setiap urusan pelayanan, indikator kinerja utamanya dan indikasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerjanya disertai indikasi pendanaannya pada Bab VII. Detail indikator kinerja daerah dijabarkan pada Bab VIII.

Rangkaian tersebut merupakan hubungan sebab akibat, sebab yang belum tepat menentukan permasalahannya akan berakibat salah sasaran dalam menentukan kebijakan program dan kegiatannya serta yang mengemban indikator kinerja utamanya.

Berikut ini tabel permasalahannya urusan pelayanan yang mengarahkan pada indikasi pencapaian kinerjanya dan struktur yang harus mengemban penyelenggaraan solusinya.

Tabel 4.1
Permasalahan Urusan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
1	Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Masih rendahnya akses pendidikan, kualitas dan penyediaan biaya operasional Sekolah Menengah	KADIS	
		Masih rendahnya akses pendidikan, kualitas dan penyediaan biaya operasional sekolah khusus		
		Belum baiknya mutu kelulusan SMA		KABID SMA
		Masih tingginya angka putus sekolah SMA		
		Masih rendahnya akses pendidikan SMA		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA		
		Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi jenjang SMA		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK		KABID SMK
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMK		
		Masih rendahnya akses pendidikan SMK		
		Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi jenjang SMK		
		Relevansi <i>link and match</i> lulusan SMK dengan dunia kerja		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus		KABID Pendidikan Khusus
		Masih Kurangnya Sekolah pendidikan Khusus yang terakreditasi		KABID Ketenagaan dan Kelembagaan
		Kurangnya Rasio Ketersediaan Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus		
		Distribusi Guru belum merata		
		Masih rendahnya kompetensi guru		
		Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan		
		Minimnya ketersediaan lembaga		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		pendidikan menengah		
		Masih tingginya angka putus sekolah SMA/SMK		Kepala KCD
		Masih rendahnya APK/APM SMA/SMK		
		Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan		Kepala UPTD Teknologi Informasi, Komunikasi, Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kebudayaan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Masih rendahnya perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	KADIS	
		Masih kurangnya pelestarian budaya Banten		KABID Pembinaan Kebudayaan
		Kurangnya pembinaan organisasi kesenian dan seni budaya		
		Belum optimalnya Pelestarian kawasan dan benda cagar budaya		
		Belum Optimalnya Tata Kelola Taman Budaya dan Museum Banten		Kepala Taman Budaya dan Museum
3	Kesehatan		DINAS KESEHATAN	
		Masih rendahnya kesehatan berkualitas dan akses kesehatan	KADIS	
		Masih rendahnya akses dan kualitas Kesehatan Masyarakat		
		Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian di RSUD		Direktur RSUD
		Minimnya Pembangunan fasilitas Pelayanan Kesehatan		KABID Pelayanan Kesehatan
		Masih adanya penduduk yang belum mendapatkan jaminan kesehatan		
		Minimnya sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit di Banten Selatan		
		Belum adanya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum optimalnya Pemerataan fasilitas kesehatan dan keterjangkauan kesehatan bagi masyarakat		
		Masih tingginya Angka Kematian Ibu		KABID Kesehatan Masyarakat
		Masih tingginya Angka Kematian Bayi		
		Masih adanya masalah stunting di masyarakat		
		Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		KABID Pencegahan dan penanggulang an penyakit
		Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular		
		Kesiapan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi (SPM)		
		Kesiapan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi (SPM)		
		Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian serta keterbatasan tenaga medis dan para medis		KABID Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
		Belum optimalnya distribusi tenaga medis		
		Masih kurangnya Kompetensi tenaga dan SDM kesehatan		Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan
4.a	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Belum Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan, Jembatan dan Irigasi yang Andal serta Terpadu dan Berbasis Penataan Ruang yang Berkelanjutan	KADIS	
		Kondisi Jaringan jalan Provinsi belum Mantap		KABID Bina Marga
		Kondisi Jembatan Provinsi belum Mantap		
		Belum adanya Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Banten		KABID Penataan Ruang

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang		
		Belum optimalnya pembinaan Jasa Konstruksi		KABID Jasa Konstruksi
		Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi		KABID Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air
		Belum optimalnya penyediaan air baku		
		Belum optimalnya Luas layanan jaringan irigasi teknis (Ha)		KABID Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air
		Masih kurangnya kebutuhan air minum curah lintas kab/kota (SPM)		
		Belum adanya pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/Kota		
		Belum Optimalnya pelayanan UPTD		Kepala UPTD
5	Perumahan dan Pemukiman		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani	KADIS	
		Tingginya Backlog (kepemilikan rumah) di Provinsi Banten		KABID Perumahan
		Belum adanya pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi		
		Belum adanya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi		
		Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman		KABID Kawasan Permukiman
		Kurangnya penataan di Kawasan Banten Lama		
		Masih minimnya sarana infrastruktur fasilitas olahraga berstandar nasional/internasional		KABID Infrastruktur Permukiman

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
7	Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Belum efektifnya Pelayanan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KADIS	
		Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang-undangan		KABID Penegakan Perundang-Undangan Daerah
		Belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban di masyarakat		KABID Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Masih kurangnya perlindungan terhadap masyarakat		KABID Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
		Belum adanya Pemetaan daerah rawan kebakaran		KABID Pemadam kebakaran
8	Sosial		DINAS SOSIAL	
		Masih tingginya jumlah PMKS	KADIS	
		Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana		
		Masih kurangnya bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan		KABID Rehabilitasi Sosial
		Masih kurangnya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti(SPM)		KABID Rehabilitasi Sosial
		Masih kurangnya rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti(SPM)		
		Masih kurangnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti(SPM)		
		Masih kurangnya rehabilitasi		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti(SPM)		
		Kurangnya Ketersediaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS		KABID Perlindungan & Jaminan Sosial
		Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana		
		Masih kurangnya Masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial		
		Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat		KABID Pemberdayaan Sosial
		Kurangnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dibina		
		Masih kurangnya Pemberdayaan Keluarga yang dibina		
		Belum optimalnya masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial		KABID Penanganan Fakir Miskin
		Optimalisasi pelayanan UPTD		Kepala UPTD
9	Tenaga Kerja		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja	KADIS	
		Belum optimalnya capaian Indeks pembangunan ketenaga kerjaan		
		Masih kurangnya Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja		
		Belum meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		KABID Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
		Masih kurangnya Pelatihan dan Kompetensi Kerja		
		Belum baiknya Hubungan Industrial		KABID Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		Belum baiknya pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja		
		Masih rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
		Kurangnya Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja		KABID Pengawasan Ketenaga Kerjaan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Proporsi penduduk yang tergolong pekerja rentan masih cukup tinggi		
		Masih rendahnya Kesempatan Kerja		KABID Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Belum optimalnya Persiapan, Pemetaan dan Pengembangan Permukiman Transmigrasi		
		Belum optimalnya pengawasan kondisi lingkungan kerja		Kepala UPTD
10	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
		Masih kurangnya akses layanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	KADIS	
		Belum optimalnya administrasi kependudukan		
		Belum terpenuhinya Data Terpilah Gender dan Anak		KABID Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
		Belum efektifnya Perencanaan Responsif Gender		
		Kurangnya Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah		
		Banyaknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		KABID Perlindungan Perempuan dan Anak
		Masih banyaknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak		
		Masih terdapat perdagangan anak dan perempuan		
		Kurangnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		
		Belum meningkatnya perlindungan hak perempuan		
		Kurangnya Perlindungan Khusus Anak		
		Masih kurangnya Pemenuhan Hak Anak		
11	Pengendalian Penduduk, Kependudukan dan Catatan Sipil		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
			ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
		Belum meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi / CPR	KADIS	
		Kurangnya Peserta KB baru		KABID Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Masih kurangnya Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)		KABID Kependudukan dan Catatan Sipil
		Masih kurangnya bayi berakte kelahiran		
		Masih kurangnya Pasangan berakte nikah		
		Belum optimalnya kepemilikan e-KTP		
		Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		
		Belum baiknya profil kependudukan		
12	Pemberdayaan masyarakat dan desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Masih belum baiknya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	KADIS	
		Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pengembangan kerjasama Lembaga Desa dan Pemerintahan Desa		KABID Penataan dan Kerjasama Desa
		Belum optimalnya upaya realisasi lembaga kemasyarakatan desa katagori baik		KABIDPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
		Belum optimalnya upaya realisasi masyarakat desa yang berhasil setelah diberdayakan		KABID Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Belum optimalnya pengelolaan Profil desa dan kelurahan		
13	Pangan		DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Belum terpenuhinya ketersediaan pangan	KADIS	
		Masih kurangnya ketersediaan		KABID

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		bahan pangan		Penyelenggara an Ketahanan Pangan
		Banyaknya masalah distribusi pangan yang belum terselesaikan		KABID Keterjangkau an Pangan
		Masih kurangnya konsumsi energi dan konsumsi protein		KABID Konsumsi dan Keamanan Pangan
		belum optimalnya keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dikonsumsi masyarakat		Kepala UPTD
14	Kelautan dan Perikanan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Masih rendahnya laju pertumbuhan sektor perikanan	KADIS	
		Kurangnya Pemanfaatan Sumber daya Kelautan yang sesuai dengan Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		KABID Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
		Belum terkelolanya ruang laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi		
		Masih rendahnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
		Masih kurangnya Produksi Perikanan Tangkap		KABID Perikanan Tangkap
		Lambatnya peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri		KABID Peningkatan Daya Saing
		Lambatnya peningkatan jumlah produk perikanan yang memenuhi standar		
		Kurangnya Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		KABID Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		Belum maksimalnya luas laut yang terawasi		
		Belum optimalnya pelabuhan perikanan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan		Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				Pantai Labuan
		Belum optimalnya pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran induk dan benih unggul ikan air payau dan laut		Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
		Rusaknya sarana dan prasarana UPTD akibat bencana alam tsunami		
		Rendahnya usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah utara Provinsi Banten		Kepala Cabang Dinas Kelautan dan perikanan Wilayah Utara
		Rendahnya usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan Provinsi Banten		Kepala Cabang Dinas Kelautan dan perikanan Wilayah Selatan
		Rendahnya standart peningkatan kualitas pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan		Kepala UPTD pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
15	Lingkungan Hidup dan Kehutanan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Belum meningkatnya Indeks Kualitas Air	KADIS	
		Masih rendahnya Indeks Kualitas Udara		
		Masih kurangnya luas area rehabilitasi hutan dan lahan		
		Belum optimalnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung		
		Kurangnya Ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan dan ketentuan izin lingkungan hidup		KABID Penataan dan Peningkatan Kapasitas
		Rendahnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup		
		Masih rendahnya indeks kualitas air dan indeks kualitas udara		
				KABID Pengelolaan Sampah, Limbah B3

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				dan Pengendalian Pencemaran
		Masih rendahnya fungsi hutan bagi masyarakat dan kawasan lindung		KABID Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
		Kurangnya pengendalian penggunaan kawasan hutan		
		Minimnya Kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan		KABID Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
		Masih belum optimalnya konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)		
		Belum optimalnya pelayanan pengujian Laboratorium Lingkungan		Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
		Belum Optimalnya pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan		Kepala Cabang Dinas DLHK
		Belum Optimalnya pengelolaan dan konservasi hutan rakyat		Kepala UPTD Tahura
		Masih kurangnya persediaan benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat		Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
16	Perhubungan		DINAS PERHUBUNGAN	
		Masih kurangnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	KADIS	
		Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi darat		KABID Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
		Masih rendahnya ketertiban lalu lintas		KABID Lalulintas
		Kurangnya pengembangan sistem transportasi wilayah		KABID Pengembang an Transportasi
		Belum optimalnya wilayah yang terlayani angkutan umum		
		Belum optimalnya penyelenggaraan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)		KABID Perhubungan Laut dan Udara
		Belum tersedianya pelabuhan		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		pengumpan regional		Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
		Masih belum optimalnya pelayanan penyelenggaraan transportasi		
17	Komunikasi dan informatika		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Peningkatan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	KADIS	KABID Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Masih kurangnya Ketersediaan Perangkat Teknologi Informasi		
		Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		KABID Aplikasi dan tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
18	Statistik dan Persandian		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	KADIS	
		Belum meningkatnya dukungan layanan Persandian		
		Belum optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		KABID Statistik, Persandian, informasi dan Komunikasi Publik
		Belum optimalnya pemanfaatan Data pembangunan Daerah dan integrasi data daerah		
		Belum optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi		
19	Koperasi dan UKM		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Masih rendahnya kualitas koperasi	KADIS	
		Masih minimnya Realisasi peningkatasn omset usaha kecil		KABID Kelembagaan dan Pengawasan
		Masih kurangnya realisasi tingkat kesehatan koperasi KSP/USP dan KSPPS/ UKSPPS		
		Masih sedikitnya koperasi aktif binaan yang cukup berkualitas		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum optimalnya hasil implementasi pelatihan pemberdayaan koperasi		KABID Pemberdayaan Koperasi
		Belum optimalnya implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil.		KABID Pemberdayaan Usaha Kecil
		Masih rendahnya usaha kecil yang bermitra dengan dunia usaha		
20	Penanaman Modal		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Masih rendahnya realisasi PMA dan PMDN	KADIS	
		Masih kurangnya Indeks Kepuasan Pelayanan Investor		
		Masih kurangnya minat calon investor		KABID Promosi dan Pembinaan BUMD
		Belum optimalnya data informasi investasi yang disebarluaskan kepada public/pemangku kepentingan serta sistem informasi investasi yang sesuai		KABID Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Masih rendahnya Potensi Investasi yang bisa terealisasi		KABID Pengendalian Penanaman Modal
		Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan		KABID Pelayanan
		Masih kurangnya pengaduan yang terlayani		
21	Olah Raga dan Kepemudaan		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Masih kurangnya Indeks Pembangunan olahraga	KADIS	
		Masih kurangnya Indeks pembangunan pemuda		
		Masih minimnya Fasilitas Olahraga untuk ikut serta pada even-even wilayah, nasional dan internasional		KABID Pemberdayaan Olah Raga
		Masih belum optimalnya Pembinaan Atlet Olahraga Beprestasi		KABID Prestasi Olah Raga

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum efektifnya pembinaan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda mandiri		KABID Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
		Belum optimalnya Pelayanan pembinaan olahraga		Kepala UPT Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
22	Perpustakaan dan Kearsipan		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Masih rendahnya budaya literasi di masyarakat	KADIS	
		Belum optimalnya SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan		
		Belum optimalnya pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan		KABID Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan
		Belum optimalnya pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus		KABID Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
		Masih minimnya pengelolaan Digitalisasi Arsip Statis dan dinamis Daerah		KABID Pengelolaan Arsip
23	Pariwisata		DINAS PARIWISATA	
		Belum meningkatnya Kunjungan Wisatawan	KADIS	
		Belum bertambah dan berkembangnya destinasi daya tarik wisata.		KABID Destinasi Pariwisata
		Masih minimnya peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya		KABID Pemasaran Produk Pariwisata
		Masih rendahnya rata-rata lama kunjungan wisatawan		
		Belum berkembangnya Industri ekonomi kreatif		KABID Pengembangan Industri Pariwisata dan
		Belum berkembangnya Industri pariwisata dan ekonomi kreatif		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				Ekonomi Kreatif
		Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat bersaing		KABID Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
24	Pertanian		DINAS PERTANIAN	
		Belum optimalnya pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	KADIS	
		Belum terpenuhinya sarana prasarana produksi pertanian		KABID Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
		Masih kurangnya produktifitas komoditas tanaman pangan		KABID Tanaman Pangan
		Belum meningkatnya produktifitas komoditas tanaman hortikultura		KABID Hortikultura
		Masih kurangnya penerapan Inovasi Teknologi Hortikultura		
		Masih kurangnya produktifitas tanaman perkebunan serta kawasan komoditas perkebunan		KABID Perkebunan
		Masih kurangnya produksi daging (Non Impor)		KABID Produksi Peternakan
		Belum optimalnya peningkatan kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		KABID Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Kurangnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM)		
		Belum optimalnya pelayanan dan tata kelola pelayanan di UPTD		Kepala UPTD
25	Energi dan Sumberdaya Mineral		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Belum optimalnya Pelayanan kelistrikan dan energy terbarukan	KADIS	
		Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Sumber Daya Mineral		
		Masih kurangnya Regulasi Geologi dan Air Tanah		KABID Geologi dan Air Tanah
		Kurangnya Pembinaan dan Pengendalian Geologi dan Air Tanah		
		Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan air tanah dan minerba		
		Masih kurangnya Regulasi Mineral dan Batubara		KABID Mineral dan Batubara
		Masih minimnya Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar		
		Masih kurangnya Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan		KABID Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
		Belum efektifnya rencana dan Pengendalian Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan		
		Masih belum optimalnya Pelayanan Listrik Perdesaan		
		Kurangnya pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ketenagalistrikan		KABID Pemanfaatan Ketenagalistrikan
		Masih kurangnya ketenagalistrikan yang memenuhi standar		
		Kurangnya Regulasi Pemanfaatan Ketenagalistrikan		
26	Industri dan Perdagangan		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			KADIS	
		Masih kurangnya LPE Sektor Perindustrian		
		Masih kurangnya LPE Sektor Perdagangan		
		Belum optimalnya jumlah Industri yang menyelenggarakan penyiapan SDM secara Link and Match		KABID Perindustrian
		Masih minimnya Kerjasama SDM berkompetensi Industri		
		Belum baiknya neraca ketersediaan barang pokok		KABID perdagangan dalam negeri
		Masih minimnya Produk Lokal		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		yang beredar pada Retail Modern		
		Belum optimalnya komoditas yang berpartisipasi pada Pasar Lelang Komoditi Berjangka		
		Masih rendahnya nilai transaksi penjualan ke luar negeri		KABID Perdagangan Luar Negeri
		Masih kurangnya Mutu/Daya Saing, Standarisasi dan Sertifikasi Produk		KABID Pengawasan
		Belum optimalnya Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa		
		Belum optimalnya jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi		Kepala Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
27	Pendapatan daerah		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah	KABAN	
		Belum efektifnya perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah terhadap potensi daerah yang tersedia		KABID Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
		Masih kurangnya Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah		
		Belum optimalnya pendapatan pajak		
		Belum optimalnya Potensi Wajib Pajak Daerah		KABID Pendapatan Pajak Daerah & UPTD
		Masih rendahnya hasil Retribusi Daerah		KABID Retribusi Daerah dan pendapatan Lain-lain
		Belum optimalnya Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah		
		Masih kurangnya ketersediaan regulasi pengelolaan bagi hasil pajak/non pajak		
28	Administrasi Keuangan Daerah		BADAN	PENGELOLAAN

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
			KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan pemerintah terhadap pencapaian kinerja daerah	KABAN	
		Belum Optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah		
		Belum Optimalnya pelayanan perbendaharaan dan anggaran		KABID Perbendaharaan dan Anggaran
		Masih kurangnya pelaksanaan manajemen aset daerah		KABID Aset Daerah
29	Kepegawaian		BADAN DAERAH	KEPEGAWAIAN
		Masih rendahnya kinerja pegawai dengan kategori baik	KABAN	KABID Perencanaan dan Mutasi Pegawai
		Belum baiknya peringkat Indeks Profesionalitas ASN		
		Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan		
		Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya		KABID Pengembangan Sumberdaya Aparatur
		Belum semua pegawai memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan		KABID Pembinaan dan Data Kepegawaian
		Kurangnya akurasi data kepegawaian		
		Belum optimalnya penanganan pegawai yang melanggar kode etik dan disiplin pegawai		
30	Sumber Daya Aparatur		BADAN SUMBER DAERAH	PENGEMBANGAN DAYA MANUSIA
		Belum Optimalnya layanan kediklatan	KADIS	KABID Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat
		Belum meningkatnya Indeks Kompetensi ASN Provinsi Banten		
		Kurangnya Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur		
		Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Masih kurangnya peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik		KABID Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
		Masih kurangnya peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik		KABID Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan
31	Perencanaan Pembangunan		BADAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN DAERAH
		Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal	KABAN	
		Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		KABID Perekonomian
		Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang sosial dan pemerintahan		KABID Sosial dan Pemerintahan
		Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		KABID Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		Belum efektifnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah		KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
		Masih kurangnya penelitian yang dimanfaatkan		KABID Penelitian dan Pengembangan
		Belum lengkapnya ketersediaan Data pembangunan Daerah		
32	(Pengawasan)		INSPEKTORAT PROVINSI	
		Belum optimalnya Capaian Maturitas SPIP	INSPEKTUR	
		Masih rendahnya tindak Lanjut LHP		Inspektur Pembantu I
		Belum efektifnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Inspektur Pembantu II
		Belum optimalnya tindak lanjut temuan APIP dan BPK RI		Inspektur Pembantu III
		Masih belum optimalnya Laporan		Inspektur

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		keuangan SKPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)		Pembantu IV
		Belum efektifnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase penyelesaian kasus-kasus/pengaduan masyarakat		
33	DPRD		SEKRETARIAT DEWAN	
		Belum optimalnya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	KEPALA	
		Belum Maksimalnya Fungsi Legislasi		KaBag Hukum dan Persidangan
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		KaBag Keuangan
		Belum efektifnya pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sekretariat DPRD		KaBag Umum dan Kepegawaian
		Masih kurangnya Dukungan alat kelengkapan DPRD terhadap pelaksanaan fungsi Pengawasan		KaBag Alat Kelengkapan DPRD
34	Administrasi Pemerintahan		SEKRETARIAT DAERAH 1 - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Masih perlunya perluasan kesempatan dan lapangan kerja	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Masih banyaknya Angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi		
		Masih rendahnya daya beli masyarakat		
		Masih kurangnya Indeks pembangunan gender		
		Masih rendahnya kualitas sekolah menengah dan khusus		
		Masih rendahnya pelayanan kesehatan		
		Masih belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	KA.BIRO PEMERINTAHAN	KaBag Administrasi kewilayahan
		Masih kurangnya realisasi kebijakan administrasi kewilayahan		
	Masih kurangnya realisasi		KaBag	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		kebijakan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah		Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Masih kurangnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	KA.BIRO HUKUM	
		Belum selarasnya peraturan perundangan daerah Kabupaten/ Kota dengan regulasi hukum nasional		KaBag Perundang-Undangan
		Belum optimalnya pelayanan Bantuan Hukum dan HAM		KaBag Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia
		Kurangnya sosialisasi dan produk hukum yang terdokumentasikan		KaBag Sosialisasi Dan Dokumentasi Produk Huku
		Masih kurangnya pelayanan Kesejahteraan Rakyat	KA.BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Masih kurangnya dokumen Rumusan Kebijakan dan Evaluasi bidang kesehatan, Dukcapil, pengendalian penduduk, KB, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		KaBag Kesehatan, Kependudukan dan Capil, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga
		Masih kurangnya dokumen Kebijakan dan Evaluasi Bidang Sosial dan Agama		KaBag Sosial dan Agama
		Masih kurangnya Dokumen Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, PMD, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		KaBag Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, PMD, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
35				Perlindungan Masyarakat
	Administrasi Pembangunan		SEKRETARIAT DAERAH 2 - ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	
		Masih rendahnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	
		Masih rendahnya pembangunan ramah karbon		
		Belum optimalnya Peningkatan daya saing daerah		
		Masih kurangnya layanan keuangan bagi masyarakat		
		Belum optimalnya infrastruktur daerah untuk menunjang pekonomian daerah		
		Masih tingginya pengangguran terbuka		
		Masih kurangnya implementasi kebijakan perekonomian daerah	KA.BIRO BINA PEREKONOMIAN	
		Masih rendahnya implelementasi kebijakan Sarana Perekonomian		Kabag Sarana perekonomian
		Kurangnya dokumen Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan		KaBag Industri Jasa dan Ketenagakerjaan
		Masih Rendahnya implementasi kebijakan mengenai produksi daerah		KaBag Produksi Daerah
		Masih Kurangnya Lembaga Perusahaan Daerah atau BUMD dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi daerah		
		Belum maksimalnya kinerja layanan Administrasi Pembangunan	KA.BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		Kurang maksimalnya keselarasan kebijakan di bidang aministrasi pembangunan		KaBag Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data
		Kurangnya maksimalnya Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan		KaBag Pengendalian Pelaksanaan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				Pembangunan
		Belum baiknya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa		KaBag Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
		Masih kurangnya implementasi kebijakan daerah bidang Infrastrukutr dan SDA	KA.BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	
		Belum maksimalnya dokumen kebijakan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Permukiman		KaBag Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurangnya dokumen kebijakan Infrastruktur ESDM		KaBag Bina Infrastruktur ESDM
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		
		Kurang berkembangnya dokumen rumusan kebijakan Perhubungan Kominfo dan sandi		KaBag Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dan Persandian
36	Administrasi Umum		SEKRETARIAT DAERAH 3 - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
		Belum baiknya Laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan (LAKIP)	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
		Masih kurangnya penerapan E-GOVERNMENT		
		Belum optimalnya laporan kinerja pemerintah (LKPJ)		
		Belum efektifnya layanan Pimpinan daerah	KA.BIRO ADMINISTRASI RUMAH	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
			TANGGA PIMPINAN	
		Masih kurangnya kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan		KaBag Tata Usaha Pimpinan
		Belum optimalnya kinerja layanan Keprotokolan		KaBag Protokol
		Belum maksimalnya kinerja layanan Rumah Tangga Pimpinan		KaBag Rumah Tangga
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		
		Masih kurangnya kualitas pelayanan di sekretariat daerah	KA.BIRO UMUM	
		Belum maksimalnya kinerja Keuangan Sekretariat Daerah		
		Masih kurangnya Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda		KaBag Perlengkapan
		Belum tepatnya laporan keuangan Sekretariat Daerah		KaBag Keuangan Setda
		Kurangnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		KaBag Tata Usaha
		Belum maksimalnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	KA.BIRO ORGANISASI	
		Nilai Capaian LAKIP Provinsi belum maksimal		
		Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang kelembagaan		KaBag Kelembagaan
		Belum optimalnya kualitas kebijakan ketatalaksanaan dan pelayanan publik		Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
		Belum tercapainya akuntabilitas kinerja aparatur		KaBag Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
37			BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		Kurangnya koordinasi Badan Penghubung terhadap Mitra Strategis	KABAN	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum efektifnya kepuasan pelayanan badan penghubung terhadap masyarakat		
38			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Masih belum baiknya Indeks Resiko Bencana	KABAN	
		Belum optimalnya upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan pengurangan resiko Bencana		KABID Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Belum optimalnya penanganan darurat bencana		KABID Kedaruratan dan Logistik
		Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana		KABID Rehabilitasi dan Rekonstruksi

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya sangat signifikan bagi entitas daerah/ masyarakat dimasa mendatang, yang meliputi permasalahan yang berlarut sudah sampai pada titik tertentu, menimbulkan dampak amat luas, yang menyangkut permasalahan kewenangan dan terkadang tidak mudah dijelaskan tetapi dirasakan kehadirannya.

Perumusan isu strategis dilakukan melalui evaluasi kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang dianggap dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan yang tersaji dalam dokumen perencanaan. Untuk itu, perumusan isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten dimulai dengan pengamatan isu strategis dalam lingkup global, nasional maupun regional.

4.2.1 Isu Strategis Global

Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan.

Sustainable Development Goals(SDGs) dicanangkan sampai dengan tahun 2030, merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals*(MDGs), yang telah berakhir tahun 2015. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa 1) mengakhiri kemiskinan, 2) mencapai kesetaraan dan 3) mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;

10. Mengurangi Kesenjangan;
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas;
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab;
13. Aksi Terhadap Iklim;
14. Kehidupan Bawah Laut;
15. Kehidupan di Darat;
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Setiap Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. Meski Perpres tersebut sudah ditetapkan sejak setahun yang lalu, Penyusunan RAD SDGs Provinsi Banten masih dalam tahapan pembahasan dan belum ditetapkan dalam bentuk peraturan Kepala Daerah. Meski demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan ini menjadi salah satu rujukan dalam penentuan issue strategis RPJMD 2017-2022 mengingat ada keterkaitan antar tujuan pembangunan global (SDGs), Nasional (RPJMN) maupun daerah (RPJMD).

Implementasi SDGS bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Perpres 59/2017). Karenanya Provinsi Banten sebagai bagian dari lingkungan strategis nasional maupun Global memiliki kewajiban untuk mensukseskan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

1. Isu Strategis Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi Banten merupakan bagian dari Wilayah Jawa, berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di Wilayah Jawa-Bali yang meliputi:

1. Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional;
2. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian;
3. Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional;
4. Menurunnya daya dukung lingkungan;
5. Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital;
6. Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali;
7. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali;
8. Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
9. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya;
10. Tingginya kasus tindak pidana korupsi;

11. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tingkat kemiskinan perkotaan di DI Yogyakarta;
12. Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
13. Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global dan Era Industri 4.0.

2. Isu Strategis Nasional Terkait Perubahan Iklim

Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam isu perubahan iklim global. Di satu sisi, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat seperti; terganggunya cuaca dan iklim yang berpengaruh terhadap musim tanam berbagai komoditas pertanian; timbulnya berbagai bencana banjir di berbagai tempat yang tidak saja mengganggu musim tanam dan panen namun juga kehidupan masyarakat; rusaknya infrastruktur dan pengikisan area pantai akibat kenaikan muka air laut; dan dampak negatif di bidang kesehatan. Indonesia sebagaimana Negara lain juga menyumbang emisi GRK. Sehubungan dengan itu, Indonesia menilai penting untuk melakukan langkah-langkah mengatasi dampak perubahan iklim dan juga mengurangi peluang timbulnya perubahan iklim dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim global.

Sebagai kelanjutan dari komitmen Presiden untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen pada Tahun 2020 dengan upaya sendiri dan sebesar 41persen dengan dukungan internasional, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai RAN-GRK. Selanjutnya Pada COP ke-21 Paris (2015), PresidenJoko Widodo menegaskan komitmen target

penurunan emisi Indonesia dalam INDC sebesar 29 persen secara sukarela pada tahun 2030

Secara eksplisit Perpres menjabarkan komitmen Presiden dengan membagi sasaran penurunan emisi GRK ke dalam 5 (lima) sektor utama yaitu Sektor Kehutanan, Sektor Pertanian, Sektor Energi dan Transportasi, Sektor Industri dan Sektor Persampahan selanjutnya adalah mengidentifikasi program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran penurunan emisi.

Provinsi Banten salah satu penyumbang emisi Gas Rumah Kaca dari berbagai Sektor tersebut, dalam upaya mendukung program nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca Di Provinsi Banten telah berkomitmen yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 39 tahun 2012 mengenai Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), menetapkan aksi mitigasi Daerah di 6 Sektor yaitu sektor Pertanian, Sektor Kehutanan, Sektor Industri, Sektor Transportasi, sektor energi dan sektor Limbah

Dengan demikian di Provinsi Banten perlu dilakukan program dan kegiatan yang mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Data Baseline dan proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan 2020 berdasarkan perhitungan BAU (*Bussines as Usual*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020

No	SEKTOR	TAHUN 2020 (Ton CO2 eq)	%
1	Pertanian	494.519	7,6
2	Kehutanan	5.299.858	81
3	Pengelolaan Limbah	605.945	9,3
4	Industri	2.492	0,04
5	Transportasi	1.648,93	0,03
6	Energi	137.613	2.1
	TOTAL	6.542.075,93	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 4.3
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari 6 Sektor di Provinsi Banten
berdasarkan Pegub 39 Tahun 2012

No	SEKTOR	TAHUN 2010 (Ton CO2 eq)	%	TAHUN 2020 (Ton CO2 eq)	%
1	Pertanian Peternakan	573.462	0.69	709,734	0.69
2	Kehutanan	5.861.511	7.08	11,723,022	11.41
3	Limbah	1,044,163	1.26	1,871,502	1.82
4	Industri	27,690.000	33.45	38,570,000	37.55
5	Transportasi	3,876,200	4.68	6,002,500	5.84
6	Energi	43,730.000	52.83	43,830,000	42.67
	TOTAL	81,800,608	100	103,215,484	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten

3. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

a. SPM pendidikan

SPM Pendidikan di Provinsi Banten adalah penguatan dalam pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Hal ini akan berimplikasi pada jumlah warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. Untuk pendidikan khusus juga bagian dari kewenangan Provinsi dimana indikator yang dilihat adalah jumlah warga Negara Usia 4–18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. Hal ini berimplikasi pada impleemntasi Program di Dinas pendidikan untuk mulai membuat Unit sekolah baru dan ruang kelas baru.

b. SPM Sosial

Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota. Persoalan Panti rehabilitasi sosial jika dilihat adalah perlunya SDM professional untuk mengisi kegiatan di dalam panti, ini dimaksudkan agar pengelolaan panti bisa lebih baik bukan hanya sekedar rumah singgah saja tapi benar-benar kegiatan dan pengelolaanya lebih terasa bagi PMKS yang tinggal. Penambahan tenaga professional misalnya penyuluh sosial, pekerja sosial dan perawat dimana kondisi saat ini tidak ada satupun ASN Provinsi yang bertugas disana. Selanjutnya kasus seperti di Panti Rehabilitasi Tuna Sosial Lebak, dengan kondisi bangunan yang cukup luas namun perawatannya kurang, lalu kegiatan yang dilakukan hanya 4 kali setahun sehingga tidak ada satupun PMKS yang ditangani tinggal di Panti tersebut.

c. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelindungan Masyarakat

Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi yang harus di perhatikan adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi. Maksud dari SPM trantibumlinmas ini jika Provinsi mengeluarkan kebijakan misalnya relokasi bangunan atau alih fungsi bangunan warga untuk kebutuhan publik, maka Pemerintah Provinsi wajib untuk melayani warga yang terkena akibat kebijakan tersebut. Untuk saat ini kondisi warga yang banyak terkena penegakan Perda adalah terkait pelebaran jalan Provinsi di kawasan KP3B dan warga masyarakat yang terkena dampak akan diberikan ganti rugi oleh Provinsi.

d. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

➤ Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota SPM bidang pekerjaan umum sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Upaya pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota diimplementasikan melalui program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional termasuk di Provinsi Banten. Pembangunan SPAM regional merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dengan perkembangan kabupaten/kota di Provinsi Banten seperti pertumbuhan perindustrian di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, serta pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Kota Serang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan mengakibatkan kebutuhan air yang meningkat namun tidak diimbangi dengan sumber air baku setempat, karena itu pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun SPAM regional.

SPAM regional dibangun atas kerja sama lintas-kabupaten/kota dan merupakan program penyediaan air minum bagi rakyat yang ada di wilayah layanan SPAM regional itu, sedangkan pengelolanya adalah pemerintah provinsi, Karena motor penggerak dan pengelola SPAM regional itu pemerintah provinsi, maka gubernur dan dinas provinsi terkait didorong untuk mengambil inisiatif dan meningkatkan perannya dalam perencanaan dan pembangunan SPAM regional di wilayahnya. Keunggulan

SPAM regional adalah agar memudahkan pemerintah provinsi dalam penanganan konservasi daerah tangkapan air, serta kemudahan dalam manajemen pengelolaan sumber daya air baku.

Saat ini di wilayah Provinsi Banten terdapat pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak serta Bendungan Sindangheula di Kabupaten/Kota Serang. Direncanakan akan dibangun SPAM regional melalui WTP Bendungan Karian dan Bendungan Sindangheula yang nantinya akan memenuhi kebutuhan air yang ada di wilayah Provinsi Banten bagian utara.

➤ **Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota**

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota SPM bidang pekerjaan umum sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan.

Beberapa permasalahan yang ada dalam pengelolaan air limbah permukiman seperti rendahnya tingkat pelayanan pengolahan air limbah di perkotaan dan perdesaan serta fasilitas pengolahan air limbah yang belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan, belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah, masih lemahnya fungsi kelembagaan di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah permukiman serta masih rendahnya kapasitas SDM yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman serta terbatasnya

sumber pendanaan pemerintah untuk investasi maupun pengembangan pengolahan air limbah serta rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan kurangnya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

Pemerintah Provinsi Banten bakal melibatkan kelompok masyarakat serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Provinsi Banten.

Implementasi dari penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di Provinsi Banten dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SPALD sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keuangan daerah Provinsi Banten.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diharapkan dapat mewujudkan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup; melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas sumber air.

e. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

➤ Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru

yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat bencana bersifat fluktuatif dan dinamis mengingat bencana tidak dapat diprediksi, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan dan rehabilitasi rumah secara kualitatif. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SPM terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi adalah penetapan status kebencanaan oleh Gubernur. Hal tersebut penting sebagai dasar hukum pelaksanaan SPM melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD pemerintah provinsi.

➤ **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.**

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat adanya program pemerintah daerah yang mengakibatkan adanya relokasi rumah bagi masyarakat, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah secara kualitatif berdasarkan hasil kajian dan produk rencana tata ruang / masterplan program pemerintah provinsi.

Program-program Pemerintah Provinsi Banten tertuang dalam indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten seperti Kawasan Strategis Provinsi,

rencana jalan baru prospektif terutama terkait dengan perencanaan tematik dan spasial Metropolitan Serang sebagai ibukota Provinsi Banten. Selain itu terdapat program-program prioritas Gubernur seperti penataan bangunan monumen dan bersejarah.

Terkait dengan program pemerintah pusat yang walaupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun pada beberapa kegiatan mensyaratkan agar Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; seperti adanya Proyek Strategis Nasional.

4.2.3 Isu Strategis Daerah Provinsi Terdekat

A. Isu Strategis Jawa Barat

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena ataubelum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampakjangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- a. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
- b. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
- c. Pengangguran dan ketenagakerjaan.
- d. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- e. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis.
- f. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province.
- g. Kualitas demokrasi.

- h. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana.
- i. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- j. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal.
- k. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat.
- l. Penanggulangan penduduk miskin.
- m. Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA).
- n. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- o. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2017 IV - 8.
- p. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU).
- q. Ketahanan Pangan.
- r. Keamanan dan ketertiban daerah.

B. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat terkait Provinsi Banten

Keterkaitan isu-isu strategis Provinsi Jawa Barat dengan isu-isu strategis Provinsi Banten ditata dalam beberapa bidang penekanan yaitu:

- 1. Geografi
 - a. Luas wilayah jawa barat 35.377,76 Km² yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota data pada tahun 2014 panjang jalan di jawa barat 22.751,155 Km, dan moda transportasi yang tersediakendaraan darat mobil dengan jumlah terminal 122, moda transportasi laut dengan 10 pelabuhan, terdapat kereta api dan bandara udara Husen Sastra Negara.
 - b. Menganangkan sebagai green province, dan kecepatan dalam penanganan bencana serta alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian menjadi hal yang penting di Jawa Barat

- c. Hal yang perlu menjadi perhatian Provinsi Banten adalah bentuk kerjasama penataan infrastruktur di perbatasan yang dapat mensinergiskan beberapa moda transportasi bagi arus barang dan penumpang, green province bagi JawaBarat juga menjadi dorongan bagi Provinsi Banten untuk menjadi bagian dari lingkungan yang sehat bagi kedua daerah. Secara Bersama mempertahankan fungsi lahan pertanian yang maju sebagai daerah lumbung padi secara bersama-sama.

2. Demografi

- a. Jumlah penduduk jawa barat 46,7 Juta jiwa dengan luas 35.377,76 Km², tingkat kepadatan penduduk 1000 jiwa km² dengan laju pertumbuhan penduduk 1,48 % pertahun, dengan tingkat pengangguran terbuka TPT 8,49 % dan penduduk miskin 8,77 % atau 4,17 Juta
- b. Pembangunan manusia di Jawa Barat pada tahun 2016 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat. Pada tahun 2016, IPM Jawa Barat telah mencapai 70,05. Angka ini meningkat sebesar 0,55 poin dibandingkan dengan IPM Jawa Barat pada tahun 2015 yang sebesar 69,50. Kontribusi berasal dari angka harapan hidup saat lahir 72,44 Tahun, Rata rata lama sekolah 7,95 dan pengeluaran perkapita 10.035.
- c. Wilayah perbatasan yang sangat dekat dengan isu kualitas sumber daya manusia yang hampir menyerupai namun dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang lebih besar menjadi perhatian terhadap potensi masing-masing daerah untuk menata kependudukan dan catatan sipilnya lebih berkualitas, kerjasama dalam mempertahankan kualitas pembangunan manusia dan

menjaga pertumbuhan laju penduduk dengan proporsi yang wajar dan seimbang.

3. Pemerintahan

- a. Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah penduduk 46,7 Juta dengan jumlah Pegawai negeri sipil 333.713, mengelola 27 Kabupaten/Kota, 626 kecamatan, 2.671 kelurahan, 3.291 desa perlu menjalankan roda pemerintahan dengan efektif dan efisien dengan senantiasa menjaga ketertiban umum. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi dari target di atas 70 persen realisasi 60 %.
- b. Provinsi Banten dalam pengelolaan pemerintahan daerah perlu selalu menjaga konsistensi kualitas pelayanan pemerintahan, menjaga stabilitas keamanan ketertiban dan menjaga partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara bersama-sama dengan Provinsi Jawa Barat.

4. Ekonomi

- a. Ekonomi Jawa Barat tahun 2016 tumbuh 5,67 persen meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 5,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,27 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (KRT) sebesar 5,60 persen. Tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Industri Pengolahan 42,49 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 15,15 persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8.90 persen.
- b. Isu perekonomian ini di Jawa barat salah satu untuk dapat menanggulangi kemiskinan dengan memperkuat Basis Data terpadu oleh Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

- c. Provinsi Banten dengan potensi perekonomian yang telah dicapai dapat membangun kerangka ekonomi dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak terjadinya penurunan angka kemiskinan. Perlu disimulasikan dan di formulasi agenda-agenda yang dapat dilakukan bersama dengan memberi hasil yang optimal.

5. Kerjasama

- a. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas menjadi potensi besar bagi pertumbuhan daerah di sekitar perbatasan Provinsi Banten.
- b. Kerjasama yang dapat dilakukan dengan pengembangan infrastruktur perbatasan, moda transportasi untuk memperlancar arus barang dan penumpang. Potensi Parawista pada masing-masing daerah dapat dikerjasamakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Kerjasama bidang perdagangan industry dan investasi dapat dikembangkan dengan optimal.

C. Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. Permasalahan pembangunan yang muncul di perbatasan kedua wilayah akan lebih efektif dan efisien jika ditangani secara bersama dengan melibatkan kedua belah pihak. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip *urban management* sesuai dengan kondisi setempat. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan

lembaga keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerjasama lainnya.

- a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau
- b. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
- d. Peningkatan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat
- e. Penanggulangan dampak perubahan iklim
- f. Pengolahan kependudukan yang berkualitas
- g. Peningkatan perbaikan iklim investasi
- h. Pengelolaan pembiayaan pembangunan
- i. Pembangunan telematika Jakarta

D. Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta terkait Provinsi Banten

Keterkaitan isu-isu strategis Provinsi DKI Jakarta dengan isu-isu strategis Provinsi Banten ditata dalam beberapa bidang penekanan yaitu:

1. Geografi.
 - a. Keseluruhan luas wilayah DKI Jakarta 7.659,02 Km² yang meliputi 662,33 Km² daratan termasuk 110 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 6.977.5 Km² Lautan, Terdapat 4 aliran sungai dari 17 Aliran sungai DKI Jakarta yang bersinggungan dengan kabupaten Kota di Provinsi Banten dan Terdapat 39 ruas jalan dengan panjang 155.687 km yang banyak bersinggungan dengan ruas jalan Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Berbagai moda transportasi pula melintas bersama di jalan Nasional yang menghubungkan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
 - b. Untuk menghadapi tantangan yang terjadi atas potensi kedua provinsi tersebut, perlu sepakati solusi dan

strategi pembangunan bersama dalam menghadapi banjir, kemacetan lalu lintas, moda transportasi barang dan orang, dan penyediaan infrastruktur yang melayani kepentingan publik serta pemanfaatan bersama ruang terbuka hijau.

2. Demografi

- a. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 Kota dan 1 kabupaten Kepulauan pada 2016 jumlah penduduk 10.177.924 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1.02persen dengan luas wilayah 7.659,02 Km² maka kepadatan penduduk 15 366,87/km² , terdapat masyarakat miskin 412,8 ribu , dengan tingkat pengangguran terbuka TPT 7,23persen dan Tingkat Partisipasi Angkat Kerja (TPAK) 66.39 persen.
- b. Pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta. Pada tahun 2016, IPM DKI Jakarta telah mencapai 79,60. Angka IPM tersebut meningkat sebesar 0,61 poin dibandingkan IPM tahun lalu yang sebesar 78,99.
- c. Jumlah tindak kejahatan/pelanggaran kamtibmas tahun 2014 sebanyak 14.44 kejadian. Jumlah anggota polisi pada tahun 2013 sebanyak 9.090 orang dimana mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2012 (10.408 orang).
- d. Dengan Potensi DKI Jakarta yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten, perlu di tingkatkan pengelolaan kependudukan yang lebih ketat dan berkualitas serta peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat secara bersama-sama.

3. Ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2016 mencapai 5.85 persen yang berarti melampaui nasional sebesar 5,02 persen dan sedikit turun dibandingkan 5,89

persen (yoy) pada tahun 2015 silam dengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 16,69, Industri Pengolahan 13,84 persen, dan konstruksi 12,89.

Jumlah proyek investasi asing dan dalam negeri 3282 proyek dengan nilai Rp 19.132.118(juta).

Sedangkan Laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2016 di Provinsi Banten 5,26 persen lebih tinggi rata rata nasional 5,04 persen dengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Industri Pengolahan 32,61 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 11,94 dan Transportasi dan Pergudangan 10,72.

- b. Melihat potensi yang besar dari lingkungan provinsi DKI Jakarta, dan beberapa keunggulan Provinsi Banten anatara lain transportasi dan pergudangan atau dari potensi yang lain di provinsi Banten.

4. Kerjasama

Posisi DKI Jakarta Sebagai ibukota Negara sangat strategis sebagai mitra kerjasama Provinsi Provinsi sebagai penyangga ibu kota yang perlu di perkuat dengan infrastruktur, yang dapat memperlancar arus barang dan penumpang. Melihat potensi dari kedua Provinsi yang saling berbatasan langsung sangat dimungkinkan kerjasama dari berbagai aspek antara lain infrasturktur pendukungn bagi DKI Jakarta, Transportasi, Parawisata, Perdagangan, Investasi dan teknologi informasi dan telematika.

E. Provinsi Lampung

- a. Pada tahun 2015, ASEAN menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi,

dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN;

- b. Provinsi Lampung berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dengan konsekuensi Provinsi Lampung berada pada jalur laut/udara yang terbuka dengan dunia luar sehingga bisa dilalui kapal dan pesawat udara asing, kondisi ini bisa dimanfaatkan menjadi jalur perdagangan ilegal (human trafficking, illegal fishing, illegal logging);
- c. Lokasi strategis Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera namun daya dukung infrastruktur seperti jaringan transportasi darat baik lintas timur maupun lintas barat guna memperlancar arus barang dan orang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya dalam kondisi rusak;
- d. Persaingan antar daerah yang ketat di mana efisiensi, produktivitas dan nilai tambah menjadi pertimbangan kinerja, menjadikan Provinsi Lampung relatif tertinggal dibanding daerah lain yang lebih efisien dan produktif dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi. Sehingga berakibat pada beratnya peningkatan keunggulan daerah (komparatif dan kompetitif) secara sektoral, komoditas dan jasa unggulan;
- e. Dengan adanya penerapan standarisasi barang dan jasa yang dikaitkan dengan isu lingkungan, HAM, dan buruh berakibat menjadi terhambatnya perdagangan akibat lemahnya pemahaman isu global. Hal ini menuntut Pemda perlu melakukan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap isu, kesepakatan dan hukum internasional;
- f. Adanya perubahan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini menuntut untuk

dilakukan pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis iptek (knowledge-based economy);

- g. Di alam demokrasi sekarang ini proses politik menjadi mahal sehingga menimbulkan pemborosan uang negara yang merupakan investasi yang tidak produktif. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu melakukan percepatan konsolidasi demokrasi untuk mencegah pemborosan yang lebih besar lagi;
- h. Terjadinya konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif yang mengakibatkan tidak optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan
- i. Publik;
- j. Ketidapastian hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah memunculkan lemahnya koordinasi dan sinergi pusat-daerah, tidak optimalnya pengelolaan anggaran negara dan daerah, dan konflik antar daerah. Karena itu pemerintah harus mengembangkan forum-forum kerjasama antardaerah;
- k. Rendahnya mutu layanan publik: Standar Pelayanan Minimal mengakibatkan lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Diperlukan regulasi pemerintah yang bertujuan mengembangkan dan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja;
- l. Lemahnya manajemen sumberdaya dan aset daerah: tata ruang, SDA, tanah, dan laut telah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kerusakan lingkungan. Perlu upaya penataan dan pengembangan manajemen sumber daya dan asset daerah, perencanaan tata ruang dan tata guna lahan;
- m. Lemahnya manajemen sumber daya dan aset daerah: tata ruang, SDA, tanah, dan laut telah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kerusakan lingkungan. Perlu upaya

- penataan dan pengembangan manajemen sumber daya dan aset daerah, perencanaan tata ruang dan tata guna lahan;
- n. Belum berjalannya reformasi birokrasi daerah telah memunculkan ketidakpastian dan kelambanan, karenanya dibutuhkan pengembangan sistem insentif dan disinsentif;
 - o. Lemahnya kerjasama dan kemitraan pemerintah dan swasta mengakibatkan rendahnya investasi, pemerintah perlu melakukan perencanaan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta.
 - p. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan yang terendah di Pulau Sumatera yaitu hanya 72,45 Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Lampung dengan laju pertumbuhan $\pm 1,23$ persen selama 10 tahun terakhir, memberikan konsekuensi dari kondisi tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan kerja, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - q. Masih tinggi angka kemiskinan di Lampung yaitu 14,86 persen, masih diatas rata-rata nasional sekitar 11,66 persen;
 - r. Kerusakan hutan di Provinsi Lampung hingga tahun 2012 sudah mencapai 55 persen dari luas yang ada akibat berbagai tekanan pembangunan dan aktivitas masyarakat. Potensi ekonomi dari kawasan hutan berupa hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati belum dimanfaatkan secara maksimal;
 - s. Beberapa daerah-daerah berpotensi ekonomi (Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara dan Way Kanan) belum terlayani oleh sarana dan prasarana yang memadai;
 - t. Masih banyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten yang belum dimanfaatkan secara optimal;

- u. Terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah, khususnya antara Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi dengan kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung;
- v. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau;
- w. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran sungai, semakin meningkatnya polusi udara di lingkungan perkotaan, dan semakin punahnya fauna dan flora lokal;
- x. Masih tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah (negara) dan masyarakat dengan perusahaan (negara/swasta);
- y. Adanya peningkatan penggunaan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi yang mendukung percepatan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten/Kota.

F. Keterkaitan dengan isu-isu strategis Provinsi Banten

Keterkaitan isu-isu strategis Provinsi Lampung dengan isu-isu strategis Provinsi Banten ditata dalam beberapa bidang kajian yaitu:

1. Geografi

- a. Luas wilayah Provinsi Banten 9.662,92 Km² dan Provinsi Lampung 35.288,35 km² keduanya berdampingan termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALK I) melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa - Selat Sunda, secara khusus selat sunda. Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut

internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus - menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia.

- b. Posisi yang strategis yang dipisahkan dengan perairan selat sunda mewaspadai kedua belah pihak dengan area terbuka tersebut rawan terhadap *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal immigration* dan *human trafficking*, untuk itu hal yang bersifat keamanan nasional yang lebih luas dan pengaturan lalulintas yang baik perlu di lengkapi dengan traffic Separation Scheme (TSS), Integrated Maritime surveillance System (IMSS) dan under water Detection yang dapat bekerjasama dengan stakeholder Kementrian Kemaritiman dan TNI Angkatan Laut;
- c. Posisi strategis tersebut dapat lebih meningkatkan perekonomian melalui arus barang, arus penumpang dan jasa melalui jalur laut nasional sekunder dan jalur utama darat tol trans Jawa, tol trans Sumatera.

2. Demografi

- a. Provinsi Banten dengan 4 Kabupaten dan 4 kota, berpenduduk 12.203.148 jiwa yang menempati luas wilayah 9.662,92 km² dengan kepadatan penduduk 1178.91 jiwa/km sedangkan Penduduk Provinsi Lampung dengan 12 Kabupaten, 2 Kota 9.499.116 jiwa, kepadatan 215.07 jiwa/km², merupakan kondisi yang sangat kontras dimana Provinsi Banten dengan luas wilayahnya berpenduduk besar sedangkan Provinsi

Lampung dengan luasan wilayah besar berpenduduk sedikit;

- b. IPM Banten sendiri pada tahun 2016 ini baru mencapai 70,96. Berarti, jaraknya dari yang ideal masih kurang 29,04 persen. Adapun status pembangunan manusianya masih tetap berkategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Betapapun juga, dengan angka IPM sebesar itu, capaian pembangunan manusia Banten berada pada peringkat tertinggi ke delapan di Indonesia, sedangkan Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,42 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 658,11 ribu jiwa. Provinsi Lampung memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan yang terendah di Pulau Sumatera yaitu hanya 72,45; Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Lampung dengan laju pertumbuhan $\pm 1,23$ persen selama 10 tahun terakhir menyisakan masih tinggi angka kemiskinan di Lampung yaitu 14,86 persen, masih diatas rata-rata nasional sekitar 11,66 persen; memberikan konsekuensi dari kondisi tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan kerja, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Kedua provinsi perlu bijaksana dan hati-hati dalam mengelola arus orang bergerak dan tinggal dengan memperketat dalam pengelolaan kependudukan dan catatan sipil sehingga kedua daerah tersebut terjadi pertumbuhan penduduk yang alami, seimbang dan proporsional.

3. Ekonomi

- a. Laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2016 di Provinsi Banten 5,26 persen lebih tinggi rata rata nasional 5,04 persen dengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam

PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Industri Pengolahan 32,61 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 11,94 dan Transportasi dan Pergudangan 10,72. Provinsi kurun waktu 2009-2013 di Provinsi Lampung Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,97persen, dan pada periode triwulan I-2017 sebesar 5,11 persendengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Pertanian, kehutanan, perikanan 32,28 persen, Indutri pengolahan 18,11 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,08persen;

- b. Pertumbuhan ekonomi dan tiga kontribusi sektor terbesar pada pada masing-masing daerah terdapat perbedaan yang menunjukkan keunggulan dan persamaan yang menjadi tren nasional, sehingga hal ini menjadi peluang yang intensif dalam beberapa sektor antara lain, sektor transportasi dan pergudangan di Provinsi Banten dapat mendukung pada Provinsi Lampung, sedangkan kesamaan pertumbuhan pada sektor industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor perlu di jaga dengan iklim ekonomi yang kondusif.

4. Kerjasama

- a. Posisi Provinsi Banten berdampingan Provinsi Lampung ini, dengan potensi geografi, demografi dan perekonomian dapat saling menguatkan dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihanannya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat;
- b. Dari perjalanan waktu dan data, informasi rintisan telah dilakukan kerjasama yang dapat di tindak lanjuti antara bidang pariwisata, Pertanian, listrik dan gas,

perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan implementasi teknologi informasi.

4.2.4 ISU STRATEGI WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN

A. Kota Tangerang

Yang menjadi isu strategis utama dalam pembangunan di kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas pelayanan Kesehatan;
3. Pengurangan Genangan dan Titik Banjir;
4. Pengembangan transportasi massal;
5. Penataan Ruang Kota yang Berkelanjutan dan penyediaan ruang publik;
6. Pemberdayaan masyarakat miskin;
7. Perluasan Kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
8. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Ekonomi Lokal;
9. Peningkatan Pelayanan Publik dan Profesionalisme aparatur Pemerintah.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Pengembangan jaringan jalan berpola grid radial utara – selatan dan timur – barat. Koridor utara – selatan menghubungkan Bandara Soekarno – Hatta sampai dengan Kabupaten Tangerang sedangkan jalur barat – timur untuk menghubungkan pergerakan Jakarta – Kota Tangerang – Kabupaten Serang. Di samping itu juga ada rencana pembangunan jalan di kiri dan kanan jalan bebas hambatan sehingga dapat membuka akses dan peluang investasi pada sepanjang koridor tersebut;

2. Ada rencana pembangunan kota baru Tangerang sebagai CBD, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat bisnis Kota Tangerang sekaligus menangkap peluang luberan dari DKI Jakarta;
3. Isu lainnya yaitu pembangunan stasiun KA di Kota Tangerang sebagai titik awal dan akhir perjalanan regional, sehingga arus lalu lintas orang dan barang dapat ditangkap/diberangkatkan dari Kota Tangerang. Pembangunan stasiun KA tersebut sebagai penyeimbang keberadaan stasiun KA Gambir, sekaligus untuk memudahkan perjalanan dari-dan-menuju Bandara Soekarno Hatta yang akan lebih mudah dijangkau dari Kota Tangerang dibandingkan dari stasiun KA Gambir.

B. Kota Tangerang Selatan

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD Serpong-Parung;
2. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-Ciputat-Simpang Gablek-Sawangan;
3. Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan;
4. Belum selesainya Jalan Siliwangi yang sudah dimulai pembangunannya dari tahun 2013;
5. Pelebaran jalan provinsi yang melintasi Tangerang Selatan, seperti Jalan Pondok Cabe – Cirendeui;
6. Flyover Pasar Serpong dan underpass Pasar Jombang;
7. Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan;
8. Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan dan TPS Regional;

9. Percepatan pembangunan monorel/RLT Tangerang Selatan-Bandara Soekarno-Hatta dan monorel /RLT Lebak Bulus-Puspiptek;
10. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Setu;
11. Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
12. Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron;
13. Revitalisasi pasar Tradisional;
14. Pembangunan Terminal Pondok Cabe.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota, sehingga perlu pengembangan kawasan untuk mendukung pengembangan potensi unggulan daerah;
2. Belum tersedianya Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

C. Kota Serang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Aparatur yang berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
3. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
4. Pelayanan publik yang berkualitas;
5. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan;

6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
7. Penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
8. Pengendalian pemanfaatan ruang guna menjamin keberlanjutan pembangunan serta pengendalian bencana alam;
9. Revitalisasi sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta UKM dan Koperasi guna mengentaskan kemiskinan;
10. Peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa berbasis pemanfaatan sumber daya setempat dalam rangka memperluas kesempatan kerja;
11. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit masyarakat dan masalah sosial lainnya, menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta iklim sosial dan politik yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan daerah;
12. Peningkatan daya saing daerah melalui pembinaan prestasi olahraga, seni dan budaya daerah, serta kewirausahaan di kalangan pemuda.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Pengembangan Wilayah Serang Utara Terpadu;
2. Dibangunnya bendungan Sindang heula untuk mengairi kawasan industri;
3. Mempertahankan dan penataan keberadaan situs Banten Lama.

D. Kota Cilegon

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Perekonomian;
2. Penataan Ruang dan Kelola SDA-LH;
3. Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial;
4. Daya Dukung, Sarpras dan Fasilitas Kota;
5. Kinerja Pemerintahan, Pelayanan dan Kamtib, Demokrasi, Hukum.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya;
2. Pengembangan Pelabuhan Regional Warnasari;
3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

E. Kabupaten Tangerang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2015 yang sebesar 5,39 persen masih harus terus ditingkatkan dalam rangka penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran);
2. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2015 adalah 70,05 yang berarti menyamai IPM provinsi Banten yang sudah menembus batas angka 70, namun demikian hal itu masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka kualitas SDM yang lebih baik lagi;

3. Tingkat urbanisasi dan migrasi yang meningkat sementara angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah sebesar 3,24 persen yang berada di atas angka rata-rata nasional;
4. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2015 adalah sebesar 62,46 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 9 persen. Kondisi kinerja ketenagakerjaan masih harus terus diperbaiki;
5. Seiring dengan pertumbuhan urbanisasi dan migrasi, dimana Kabupaten Tangerang adalah termasuk daerah penyangga ibukota DKI Jakarta maka pertumbuhan pemukiman dan kekumuhan di wilayah kabupaten Tangerang adalah sesuatu yang sulit dihindari. Akibatnya keindahan dan keteraturan kabupaten Tangerang akan terganggu;
6. Daerah penyangga ibukota DKI Jakarta juga menjadikan Kabupaten Tangerang mengalami kemacetan lalu lintas. Hal ini terutama terjadi ketika jam berangkat kerja di pagi hari dan pulang kerja di sore-malam hari;
7. Angka kemiskinan masih harus terus ditekan dari posisi yang sekarang karena hal ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di wilayah kabupaten Tangerang;
8. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB) serta keberadaan penyakit menular yang mengganggu kinerja pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten Tangerang.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah Regional di Kabupaten Tangerang;
2. Pengembangan Kawasan Industri maritim di Kabupaten Tangerang;

3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

F. Kabupaten Serang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial
 - Angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang pada posisi 64,49 Point;
 - Persentase kemiskinan yang mencapai 20,75 persen dari total penduduk;
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 14,8 persen.
2. Ketersediaan dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur
 - 500 Km jalan Kabupaten kondisi belum mantap;
 - 601 Ruang Kelas SD, 97 Ruang Kelas SMP dan 113 Ruang Kelas SMA / SMK dalam kondisi rusak;
 - 14 Puskesmas memerlukan perbaikan / perawatan.
3. Penataan Ruang, Permukiman, Pengelolaan Bencana dan Lingkungan Hidup;
4. Pemerataan dan Kualitas Perekonomian;
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Penataan kawasan perbatasan di Kabupaten Serang dan sekitarnya;
2. Penambangan di kawasan hutan Gunung Gede dapat mempertinggi volume aliran permukaan, menyebabkan banjir dan longsor serta mengurangi peresapan air tanah;

3. Pengembangan Kawasan Pusat Distribusi Regional di Kecamatan Kopo;
4. Pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Padarincang untuk meningkatkan sektor kepariwisataan Provinsi Banten;
5. Perlu pengembangan kawasan industri yang ditetapkan dalam satu kawasan untuk menampung industri-industri baru dan industri yang berada di luar kawasan.

G. Kabupaten Lebak

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Kemiskinan dan ketenagakerjaan;
3. Iklim investasi dan daya saing daerah;
4. Ketahanan pangan;
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah;
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Kabupaten Lebak memiliki Bendungan Karian di empat kecamatan namun lebih dikenal/terkonsentrasi di Kecamatan Sajira sebagai salah satu dam strategis nasional karena akan dipakai untuk suplai air baku ke Jakarta, Cilegon, dan Tangerang, dengan kapasitas 208.000.000 M³ dan luasnya hampir 1.774 Ha. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi Kawasan Perkotaan, Kawasan Bojonegara, dan untuk mempertahankan ketahanan pangan (lumbung padi);

2. Rencana pengembangan kawasan industri yang didukung potensi pertambangan dibagian selatan, di Kecamatan Bayah;
3. Pengembangan kawasan pariwisata geologi di selatan Kabupaten Lebak;
4. Pengembangan Kawasan Perumahan Kota Baru Publik Maja di Wilayah Kabupaten Lebak yang perlu didukung pembangunan infrastruktur;
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

H. Kabupaten Pandeglang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurang berdayanya masyarakat khususnya di perdesaan;
2. Penataan ruang dan kawasan/kewilayahan kabupaten Pandeglang masih belum optimal. Hal ini terkait dengan belum adanya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu, permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah;
3. Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana publik khususnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan jalan serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah, permasalahan ini terkait dengan masih dilakukannya aktivitas perekonomian barang mentah pada sektor unggulan, belum dilakukannya aktivitas perekonomian pada sektor

unggulan dengan meningkatkan nilai tambah dan nilai rantainya;

5. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini khususnya terkait dengan belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, serta belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;
6. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih lemah, permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Rencana pembangunan lapangan terbang perintis Banten Selatandi Kabupaten Pandeglang. Rencana pembangunan lapangan terbang perintis tersebut dilakukan dari Departemen Perhubungan Pusat pada tahun 2005, di samping untuk percepatan pembangunan daerah juga mempertimbangkan keberadaan potensi pariwisata khusus Tanjung Lesung, Carita, di Kabupaten Pandeglang;
2. Penataan Kawasan agroindustri di Kabupaten pandeglang;
3. Untuk pengembangan bagian selatan Provinsi Banten pada umumnya dan Kabupaten Pandeglang pada khususnya perlu peningkatan jalan nasional yang menghubungkan bagian selatan Provinsi Banten maupun Kabupaten Pandeglang dengan bagian utara wilayah tersebut;
4. Penanggulangan banjir di selatan Kabupaten Pandeglang;
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4.2.5 Isu Strategis Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030

Beberapa isu strategis yang terdapat di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mendorong orientasi pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi mendorong dikembangkannya paradigma perencanaan pembangunan yang mengurangi ketergantungan pada *trickle down effect* pusat pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar global.
2. Kebijakan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten perlu diposisikan secara tepat pada arah kebijakan tersebut, sehingga mampu berperan sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan melalui pembentukan ruang secara regional planning.
3. Ketidakseimbangan pertumbuhan (*imbalanced growth*) antar Wilayah Banten Selatan dan Wilayah Banten Utara di Provinsi Banten, berdampak pada ketidakseimbangan pertumbuhan, serta akan mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial-ekonomi (*disparitas*) yang dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan. Azas demokratisasi ruang dan sinergi wilayah perlu melandasi RTRW Provinsi Banten dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut, dengan mengakomodir RTRW Kabupaten/Kota serta keterkaitan dengan RTRW Jawa-Bali.
4. Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu yang perlu dipertimbangkan dalam RTRW Provinsi Banten, terutama

menyangkut okupansi kawasan lindung dan masalah pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan upaya mempertahankan Kawasan Lindung di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Akarsari dan DAS Cidanau.

5. Eksplorasi bahan tambang dan mineral sebagai bagian peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga persoalan lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, perlu adanya keseimbangan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat untuk menghindari kecemburuan sosial ekonomi.
6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara bijaksana dan optimal.

4.2.6 Isu Strategis Daerah Dalam RPJPD Provinsi Banten 2005-2025

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 isu strategis dan permasalahan pokok yang dikembangkan merujuk pada Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Banten tahun 2005-2025 dengan penyajian sebagai berikut :

1. Isu Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial

Dengan mencermati berbagai fenomena dan kecenderungan yang terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya, khususnya yang terkait masalah ketahanan pangan, kemiskinan, kualitas SDM, dan kesejahteraan sosial dapat diindikasikan beberapa isu pembangunan dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Masih tingginya tingkat kemiskinan, dimana 8,5 persen penduduk (816.742) masih tergolong dalam kategori miskin

hingga tahun 2008, dengan sebaran di wilayah perkotaan sekitar 45,0 persen dan wilayah perdesaan 55,0 persen.

- b. Masih terdapatnya kantung-kantung rawan gizi buruk, terutama disebabkan karena tidak memadainya pelayanan kesehatan.
- c. Masih belum memadainya tingkat pendidikan masyarakat, dimana dari tahun 2006 hingga tahun 2008 dengan angka rata-rata lama sekolah adalah 8,1 tahun (standar nilai maksimum 15 tahun, UNDP). dan angka melek huruf masih sebesar 95,6 persen (standar nilai maksimum 100 persen, UNDP)
- d. Masih belum memadainya tingkat kesehatan masyarakat, dimana angka harapan hidup baru mencapai 66,0 tahun hingga tahun 2008 (standar nilai maksimum 85 tahun, UNDP).
- e. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2008, yang terdiri dari 91.438 jiwa PMKS.
- f. Suku Baduy sebagai komunitas adat terpencil (KAT) yang memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus atas keberadaan dan keberlanjutan komunitasnya.
- g. Sebanyak 764 desa atau 51,52 persen terhadap jumlah desa/kelurahan di Provinsi Banten tergolong dalam desa tertinggal, yang terdiri dari 458 desa tertinggal di daerah tertinggal dan 306 desa tertinggal di daerah non tertinggal.
- h. Kualitas SDM dan peran perempuan masih menunjukkan ketertinggalan dibandingkan dengan kualitas SDM dan peran laki-laki dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2008 sebesar 62,0 (di bawah IPG Nasional 65,3), dan menempatkan Banten pada peringkat 28 dari 33 provinsi.
- i. Degradasi nilai-nilai moral dan budaya semakin bertumbuhkembang seiring dengan derasnya pengaruh globalisasi.

- j. Masih tingginya pertumbuhan penduduk, dimana hingga tahun 2008 jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 9.602.445 jiwa. Dalam kurun waktu 2007-2008 jumlah penduduk bertambah sebanyak 178.939 jiwa atau meningkat sebesar 2,15 persen. Kepadatan penduduk Provinsi Banten adalah 1.065 jiwa/km².
2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berorientasi Pasar Global dengan permasalahan pokok yang meliputi:
 - a. Hingga tahun 2008, sekitar $\pm 88,0$ persen perekonomian Provinsi Banten dihasilkan oleh aktifitas ekonomi di wilayah utara (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan) yang bertumpu pada sektor sekunder dan tersier, sedangkan $\pm 12,0$ persen sisanya dihasilkan oleh aktifitas ekonomi di wilayah selatan (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) yang bertumpu pada sektor primer.
 - b. Ketidakmerataan kondisi perekonomian wilayah, dimana nilai ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2008, dapat diklasifikasikan dalam 'daerah sangat berkembang' (Kabupaten Tangerang (termasuk Kota Tangsel), dan Kota Tangerang) dengan pencapaian PDRB a.d.h. berlaku Rp.35,12–44,69 trilyun), 'daerah berkembang' (Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dengan pencapaian PDRB a.d.h. berlaku Rp.10,73–18,01 trilyun) serta 'daerah sedang berkembang' (Kota Serang, Kab. Lebak, dan Kab. Pandeglang) dengan pencapaian PDRB a.d.h. berlaku Rp.4,36–6,94 trilyun).
 - c. Ketidakseimbangan minat tujuan investasi, dimana sampai dengan tahun 2008 sekitar 97,40 persen nilai proyek investasi PMA dan 86,41 persen nilai proyek investasi PMDN berlokasi di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

- d. Orientasi investasi belum bertumpu pada sumberdaya lokal, dimana sektor usaha yang diminati melalui investasi masih terkonsentrasi pada sektor usaha perdagangan dan reparasi, industri logam dasar, barang dari logam, mesin dan elektronika, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi, dan industri tekstil.
 - e. Belum optimalnya nilai tambah sektor tersier dan sektor primer, dimana tercermin dari kontribusi ekonomi sektor tersier yang masih sebesar 38,95 persen dan sektor primer sebesar 8,5 persen.
 - f. Belum optimalnya peran sektor dalam penyerapan tenaga kerja, dimana sektor sekunder dengan kontribusi ekonomi 52,56 persennya menyerap tenaga kerja 19,24 persen, sektor tersier dengan kontribusi ekonomi 38,95 persen menyerap tenaga kerja 41,12 persen, sedangkan sektor primer yang kontribusi ekonominya hanya sebesar 8,5 persen mampu menyerap tenaga kerja 22,16 persen.
 - g. Masih tingginya pengangguran dan rendahnya kualitas SDM tenaga kerja lokal, dimana hingga tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten masih sebesar 6,8 persen, dan komposisi penduduk usia 10 tahun keatas menurut pendidikan masih menunjukkan proporsi 93,7 persen berpendidikan non sarjana (tamat SLTA hingga tidak sekolah).
 - h. Masih rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat, dimana hingga tahun 2008 indeks daya beli masyarakat baru mencapai 56,4 (standar nilai maksimum 100, UNDP). Sedangkan angka gini ratio pada tahun 2008 masih sebesar 0,30.
3. Pengembangan Pelayanan Kepelabuhanan Skala Nasional dan Internasional serta Peningkatan Prasarana dan Sarana Wilayah, dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Perlunya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan bandar dan pelabuhan yang terdapat di Provinsi Banten (Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Merak, Bandara Soetta, Pelabuhan Perikanan, dll), sebagai gerbang inlet dan outlet distribusi barang (ekspor-impor) dan penumpang, baik dalam lingkup nasional dan internasional.
- b. Koordinasi dan kerjasama yang belum terpadu dan solid dalam upaya pengembangan Pelabuhan Internasional Bojonegara dan Pengembangan KEK Bojonegara, baik antar instansi pemerintah secara vertikal atau horisontal, maupun antara pemerintah dengan pihak swasta (investor).
- c. Ketidakmerataan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang menghambat upaya percepatan pemerataan pembangunan, dimana tingkat ketersediaan jaringan jalan negara dan provinsi di wilayah utara (0,33 km/km²) lebih memadai daripada di wilayah selatan (0,26 km/km²).
- d. Pengelolaan sistem jaringan transportasi (antar moda, antar wilayah dan antar lembaga) masih belum terpadu, dimana pelayanan sarana angkutan umum umumnya lebih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah perkotaan, jaringan kereta api belum menyentuh langsung pada bangkitan perjalanan (seperti kawasan industri, bandar udara, serta jalur padat yang melayani angkutan komuter) disertai dengan frekuensi layanan yang masih terbatas, kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, rendahnya disiplin masyarakat pengguna jalan, profesionalitas aparat dan operator transportasi, hingga meningkatnya kemacetan dan kecelakaan dalam penyelenggaraan transportasi.
- e. Masih rendahnya pelayanan jaringan irigasi lintas kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan pertanian, dimana jaringan irigasi lintas kabupaten/kota yang menjadi

- kewenangan pengelolaan provinsi, hingga tahun 2008 sekitar 20,68 persen rusak berat (tidak dapat beroperasi), 18,41 persen rusak ringan, dan 60,91 persen dalam kondisi baik.
- f. Kondisi rasio elektrifikasi diluar Tangerang hingga tahun 2008 adalah 72,6 persen, namun demikian rasio elektrifikasi Banten relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio elektrifikasi Nasional sebesar 64,3 persen, serta rasio elektrifikasi Jawa Barat sebesar 61,5 persen.
 - g. Masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi rumah tangga, dimana pelayanan air bersih melalui perpipaan baru menjangkau kawasan perkotaan dengan kapasitas 176.890 sambungan, atau sekitar 7,72 persen rumah tangga hingga tahun 2008.
 - h. Masih belum memadainya penyediaan rumah dan kualitas perumahan, dimana baru 85,79 persen rumah tangga yang memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri. Sebanyak 37,23 persen rumah tangga menghuni tempat tinggal dengan luas lantai < 50 m². Masih terdapat 29,00 persen rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi menggunakan jamban sendiri sebesar 30,20 persen. Sementara itu, terdapat 244,31 ha kawasan kumuh yang belum ditangani di kabupaten/kota di Provinsi Banten.
4. Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup, dengan permasalahan pokok yang meliputi:
- a. Belum optimalnya kelembagaan dan implementasi penataan ruang, dimana koordinasi penataan ruang belum berjalan secara maksimal antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun dengan wilayah perbatasan belum berjalan baik, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya.

- b. Belum memadainya operasionalisasi atas penetapan fungsi-fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten, yang meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan. Termasuk belum memadainya kesiapan provinsi dalam mendukung Kawasan strategis Provinsi
- c. Belum optimalnya Rasio realisasi pemanfaatan dalam rencana pola ruang pada luas kawasan budidaya dan luas kawasan lindung secara akumulatif dari kondisi eksisting adalah sebesar 80,7 persen budidaya dan 19,3 persen lindung. Hal ini ditandai dengan beberapa peruntukan lahan yang terkonversi, sehingga untuk mencapai target 30 persen kawasan lindung tahun 2030 diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air, dimana kerusakan sungai terjadi pada 3 Wilayah Sungai (WS Ciujung-Ciliman, WS Cisadea-Cikuningan dan WS Cisadane-Ciliwung), sungai lintas kabupaten/kota dalam kondisi rusak sebesar 19,54 persen, pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal, dan sebagian besar situ tidak dilengkapi dengan bangun-bangunan irigasi.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam, dimana beberapa potensi sumberdaya mineral hingga saat ini belum diusahakan seperti tras, batu apung, besi dan andesit. Sumber daya energi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan seperti: sumberdaya energi fosil (batubara), energi panas bumi, tenaga air skala kecil, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, dan energi gelombang laut. Potensi sumberdaya perikanan tangkap baru memanfaatkan 82,09 persen dari potensi lestarnya (wilayah perairan Kabupaten Pandeglang). Potensi sumberdaya perikanan budidaya, meliputi budidaya laut (KJA dan rumput laut) di pantai utara dan pantai barat, serta

potensi lahan tambak baru dimanfaatkan sekitar 78,8 persen. Hingga saat ini telah diidentifikasi 60 obyek wisata kategori alam, dan sebagian besar belum dikembangkan.

- f. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan limbah berbau, beracun dan berbahaya.
 - g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan serta rendahnya penegakan hukum lingkungan.
 - h. Semakin meningkatnya ancaman bencana alam.
5. Pemerintahan yang baik dan bersih, dengan permasalahan pokok yang meliputi:
- a. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah.
 - b. Belum memadainya dukungan prasarana dan sarana pemerintahan daerah.
 - c. Belum memadainya kualitas SDM dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
 - e. Belum memadainya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - f. Pembentukan daerah otonom baru dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
 - g. Perlunya pemeliharaan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum
 - h. Belum optimalnya ketersediaan produk hukum daerah dan penegakan supremasi hukum.
 - i. Dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilu presiden, dan PILKADA.

Berdasarkan hasil analisa dan kajian terhadap kondisi dan tantangan pembangunan yang dihadapi Provinsi Banten di masa mendatang, maka sebagai arahan dan acuan dalam pelaksanaan

pembangunan ditetapkan target-target makro pembangunan Provinsi Banten hingga tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Estimasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2025

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	TAHUN 2008	ESTIMASI TAHUN PERENCANAAN			
				2012	2017	2022	2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,82	6,5 – 6,8	6,8 – 7,0	7,0 – 7,4	7,4 – 7,8
2.	PDRB a.d.h. Berlaku	Rp. Trilyun	122,497	180,68	282,96	430,13	548,88
3.	PDRB a.d.h. Konstan	Rp. Trilyun	68,83	87,75	119,95	166,24	203,60
4.	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	12,76	17,14	24,52	34,12	45,06
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa	9.602.445	10.501.425	11.526.493	12.626.715	13.164,799
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	2,15	2,00	1,86	1,71	1,62
7.	Persentase Pengangguran Terbuka	persen	6,8	5,6 – 5,2	5,2 – 4,8	4,8 – 4,4	4,4 – 4,0
8.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	816.742	650.000 – 600.000	600.000 – 550.000	550.000 – 500.000	500.000 – 450.000
9.	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM)	persen	33,04	25,0 – 23,0	20,0 – 15,0	15,0 – 10,0	10,0 – 5,0
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,7	72,88	75,48	78,08	80,08

Asumsi :

- Terjaganya stabilitas moneter;
- Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif;
- Tidak terjadi bencana dengan skala yang besar;
- Inflasi YOY berada dibawah 7,5 persen;
- Adanya komitmen bersama seluruh stakeholders.

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Dengan mempertimbangkan target angka dan nilai estimasi dari beberapa indikator makro pembangunan tersebut, maka dalam dua puluh tahun mendatang dapat diperkirakan beberapa kondisi yang akan dihadapi oleh Provinsi Banten sebagai berikut:

Tabel 4.5
Estimasi Kondisi Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2025

NO	KOMPONEN	ASUMSI/ STANDAR	SATUAN	ESTIMASI TAHUN PERENCANAAN			
				2012	2017	2022	2025
1.	Kebutuhan Pangan	120 Kg/Jiwa/Th	Ton	1.260.171	1.383.179	1.515.206	1.579.776
2.	Kebutuhan Perumahan	1 Unit/KK	Unit	2.100.285	2.305.298	2.525.343	2.632.960
3.	Kebutuhan Air Bersih	120 Lit/Jiwa/Hari	Liter	1.260.171.013	1.383.179.181	1.515.205.910	1.579.775.997
4.	Kebutuhan Listrik	0,15 KVA/Jiwa	KVA	1.575.214	1.728.974	1.894.008	1.974.720
5.	Timbulan/Pro-duksi Limbah	2,5 Lit/Jiwa/Hari	Liter	26.253.563	28.816.233	31.566.790	32.912.000

Sumber : Hasil Analisis, 2008

4.2.7 Isu Strategis Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil analisa berbagai isu strategis lingkup global, nasional maupun regional sebagaimana diuraikan sebelumnya, perumusan isu strategis di Provinsi Banten di kelompokkan dalam lima aspek yakni:

1. Isu strategis kesenjangan wilayah
2. Isu strategis daya saing daerah (Sumber daya alam dan sumber daya manusia)
3. Isu strategis Kemiskinan dan Pengangguran
4. Isu strategis Tata Kelola Pemerintahan
5. Isu Strategis Kebencanaan

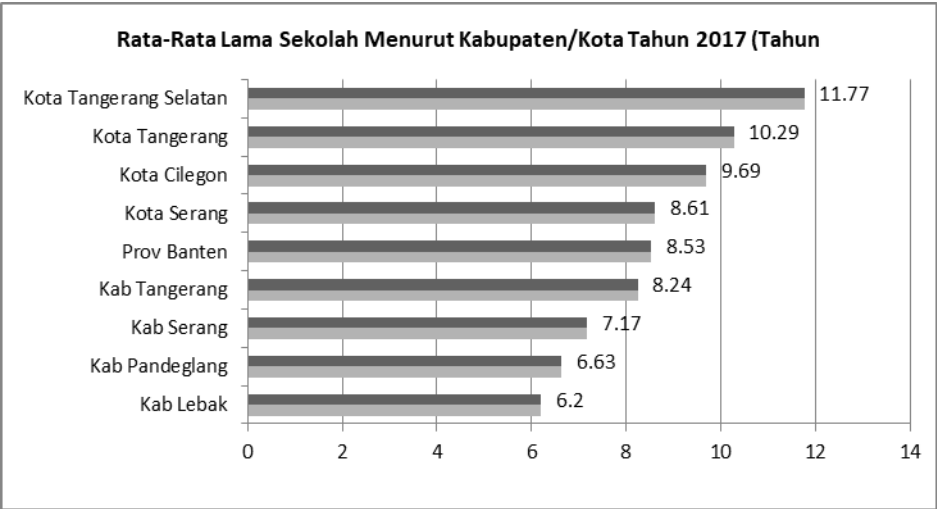
Untuk memberikan gambaran terhadap isu strategi disampaikan penjelasannya dengan data pendukung sebagai berikut.

1. Isu Strategis Kesenjangan Wilayah

Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2015 kembali menempatkan Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebagi daerah tertinggal diantara 122 Kabupaten lainnya di Indonesia. Berbeda dengan Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil mengentaskan ketertinggalanya, proses pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Banten selama periode 2010-2014 seolah

belum berhasil mengangkat capaian Kabupaten Lebak dan Pandeglang dalam pemenuhan 6 (enam) kriteria utama dalam penetapan daerah tertinggal yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Belum terpenuhinya cakupan 6 (enam kriteria utama) tersebut, berimplikasi potret ketimpangan yang terjadi diberbgai sector antara lain:

- Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan



Sumber: SIPD Provinsi Banten

Gambar 4.1
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

Pada grafik tergambarkan rata-rata lama sekolah di wilayah kabupaten masih dibawah rata-rata lama sekolah di wilayah perkotaan, terutama di Kab. Lebak dan Pandeglang.

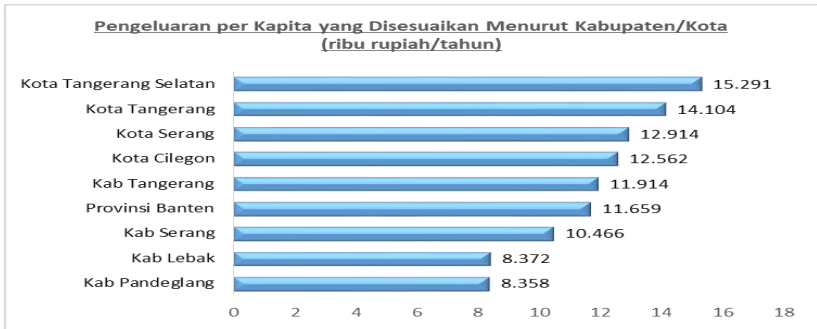
- Ketimpangan Aksesibilitas Kesehatan
Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih responsive dalam peningkatan capaian baik dalam hal mutu maupun jenis yang dipersyaratkan dalam regulasi tersebut. Perbandingan jumlah sarana prasarana kesehatan atau pun tenaga kesehatan dibandingkan jumlah penduduknya masih menunjukkan tingkat ketimpangan dibandingkan antar wilayah. Ketersediaan rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk jumlahnya sangat kecil pada kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang dibandingkan rata-rata ketersediaan rumah sakit di Provinsi Banten. Khususnya di Kab Tangerang kebutuhan puskesmas tiap 100.000 penduduk masih perlu ditingkatkan.

Tabel 4.6
Fasilitas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit	Puskesmas	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk dengan Jumlah Rumah Sakit	Rasio Puskesmas Berdasarkan per 100.000 Penduduk
Kabupaten					
Pandeglang	2	36	345012	172506000	10.43
Lebak	4	42	360031	90007750	11.67
Tangerang	21	44	763174	36341619.05	5.77
Serang	3	31	451922	150640666.7	6.86
Kota					
Tangerang	32	33	474112	14816000	6.96
Cilegon	5	8	128837	25767400	6.21
Serang	10	16	215168	21516800	7.44
Tangerang Selatan	29	29	355296	12251586.21	8.16
Provinsi Banten	106	239	3093552	29184452.83	7.73

Sumber: SIPD Provinsi Banten

- Ketimpangan Daya Beli Masyarakat



Sumber: SIPD Provinsi Banten

Gambar 4.2
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota
(Ribu Rupiah/Tahun) Tahun 2017

Pengeluaran perkapita Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang besarnya masih tertinggal terhadap Pengeluaran per kapita Provinsi Banten. Sementara di wilayah perkotaan pengeluaran per kapita sudah cukup tinggi.

- Kurangnya Infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat (Sesuai Potensi Ekonomi Wilayah)
Hubungan kebutuhan infrastruktur pada masyarakat bisa di ukur dengan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Sementara rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk (ribu jiwa) suatu

wilayah dengan panjang jalan (km).Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah ribu jiwa penduduk.

Tabel 4.7
Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk (ribu jiwa/km)
Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Jumlah Penduduk	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk (ribu jiwa/km)
1	Kab. Pandeglang	723,03	345012	
2	Kab. Lebak	837,96	360031	
3	Kab. Tangerang	992,61	763174	
4	Kab. Serang	601,13	451922	
5	Kota Tangerang	280,71	474112	
6	Kota Cilegon	304,13	128837	
7	Kota Serang	164,90	215168	
8	Kota TangerangSelatan	397,65	355296	
Jumlah		4302.12	10382590	

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Di Kota Tangerang, Kab Tangerang dan Kota Tangerang Selatan jumlah penduduk yang per kilometer panjang jalan cukup tinggi, sehingga menimbulkan kepadatan dijalan, di wilayah ini perlu ditingkatkan layanan panjang jalan untuk bisa menopang potensi ekomoni wilayah yang memadai.

- Ketimpangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah dan Wilayah
- Kurangnya Konektivitas Infrastruktur Kewilayahan dan Antar Wilayah

Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah masih dibawah 20 persen pada semua kabupaten di Provinsi Banten.

Tabel 4.8
Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Luas Wilayah (km2)
Kabupaten			
1	Pandeglang	723,03	2.746,89
2	Lebak	837,96	3.426,56
3	Tangerang	992,61	1.011,86
4	Serang	601,13	1.734,28
Kota			

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Luas Wilayah (km2)
1	Tangerang	280,71	153,93
2	Cilegon	304,13	175,50
3	Serang	164,90	266,71
4	TangerangSelatan	397,65	147,19
Jumlah		4302.12	9.662,92

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Pada isu strategis kesenjangan wilayah keterkaitanya dengan misi RPJMN 2015-2019 pada misi 1 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, keterkaitannya dengan NAWACITA ke 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

2. Isu Strategis Daya Saing Daerah

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional, hasil survey National University of Singapore (2018) menyebutkan bahwa peringkat daya saing Provinsi Banten pada tahun 2017 menduduki urutan ke enam dari 34 provinsi di Indonesia. Meski mengalami peningkatan dibandingkan hasil yang diperoleh tahun sebelumnya yakni peringkat ke-11, namun berbagai upaya harus dilakukan mengingat posisi strategis Provinsi Banten dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya menjadi modal untuk mengubah keunggulan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif.

Sumber daya manusia merupakan salah satu indikator yang menjadi penentu tingkat daya saing daerah. Berdasarkan tingkat Pendidikan yang ditamatkan, diversitas antar wilayah masih terlihat, hal ini tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9
 Persentase Penduduk Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota yang Menamatkan Pendidikan jenjang SMA dan Perguruan Tinggi Tahun 2016 dan 2017

No	Kabupaten/Kota	2016		2017	
		SMA	Perguruan Tinggi	SMA	Perguruan Tinggi
1	Kab. Pandeglang	12,26	4,56	11,38	3,65
2	Kab. Lebak	10,32	3,12	8,25	2,47
3	Kab. Tangerang	26,74	4,19	24,37	4,52
4	Kab. Serang	19,22	3,88	18,08	3,29
1	Kota Tangerang	41,02	12,36	37,63	12,03
2	Kota Cilegon	27,23	8,53	33,51	8,17
3	Kota Serang	21,50	8,33	23,30	8,12
4	Kota Tangerang Selatan	34,59	20,14	34,55	26,03
Jumlah		26,09	8,07	24,75	8,67

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase pendudukan yang menamatkan Pendidikan jenjang SMA dan perguruan tinggi di wilayah Provinsi Banten baru mencapai 33,42%. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 34,16%. Diperlukan strategi pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan untuk meningkatkan nilai tersebut.

Tabel 4.10
 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Ribu USD)	Penyerapan Tenaga Kerja
Kab. Pandeglang	9	97.087	1
Kab. Lebak	24	403.545	1
Kab. Tangerang	786	13.198.266	275
Kab. Serang	271	3.591.425	143
Kota Tangerang	415	3.048.335	168
Kota Cilegon	161	10.194.284	51
Kota Serang	17	6.669.919	-
Kota Tangerang Selatan	212	682.924	44
Total	1.895	37.885.485	683

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Tabel 4.11
 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut
 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Penyerapan Tenaga Kerja
Kabupaten/Kota			
Pandeglang	6	310.223	0
Lebak	14	356	0
Tangerang	326	8.135.633	34
Serang	116	2.382.189	1
Kota			
Tangerang	165	1.146.348	14
Cilegon	55	4.097.963	35
Serang	11	341.349	-
Tangerang Selatan	25	2.223.500	0
Total	718	18.637.561	84

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Pada isu strategis daya saing (sumber daya alam dan sumber daya manusia), keterkaitanya dengan RPJMN 2015-2019 pada misi 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, misi ke 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan, dan keterkaitannya dengan NAWACITA ke 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, ke 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, Ke 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Permasalahan daya saing ekonomi dan daya saing wisata menjadi salah satu permasalahan di Provinsi Banten. Berbicara potensi SDM dan potensi SDA terlihat sudah tidak diragukan lagi, namun menjadi kendala bagaimana potensi-potensi tersebut tidak bisa menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan menjadi nilai lebih untuk menunjukandaya saing daerah, misalnya dalam hal sumber daya alam yang bisa dijadikan potensi wisata, memiliki panjang garis pantai seluas hampir 509 km, ditambah dengan masuknya proyek strategis nasional di Kawasan KEK Tanjung Lesung harusnya bisa mendongkrak daya saing ekonomi.

Selain objek wisata berbasis alam, tak kalah juga objek wisata berbasis sejarah dan religi. Potensi kunjungan wisata religi ini cukup besar apalagi menjelang ibadah haji dan hari-hari besar islam.Potensi wisata religi di Provinsi Banten yang cukup populer diantaranya

Cagar Budaya Banten Lama, Cagar Budaya Banten Girang dan Wisata Batu Qur'an. Permasalahannya potensi wisata religi ini belum dikelola, direvitalisasi dan dilestarikan secara profesional. Perlu sinergitas antar pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota untuk mendukung kemajuan tersebut, ini agar daya saing kita di bidang ekonomi dan pariwisata tidak tertinggal dengan provinsi lain.

Daya saing SDM di Provinsi Banten khususnya dalam bidang olahraga dirasa masih tertinggal jauh dengan Provinsi yang berada di Pulau Jawa. Prestasi olahraga di Banten jika kita lihat dalam PON (Pekan Olahraga Nasional) tahun 2016, Banten meraih posisi ke 13 dimana 4 peringkat teratas adalah provinsi yang wilayahnya ada di Pulau Jawa (1.Jawa Barat, 2.Jawa Timur, 3.DKI Jakarta, 4.Jawa Tengah). Permasalahan ini dirasa karena masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga dengan standar nasional atau internasional serta masih sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena sarana yang masih sangat terbatas di kabupaten/kota. Selain peraihan prestasi disebabkan pula pada proses pembinaan dan pelatihan yang masih belum optimal dan sinergitas antara industri olahraga, Pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga yang dirasa masih sangat kurang.

Manfaat perhelatan event Asian Games di komplek olah raga JakaBaring Palembang telah terbukti membawa dampak positif bagi perekonomian wilayah. Karenanya sangatlah relevan pembangunan Sport Center di Provinsi Banten yang awalnya diperuntukan untuk pelaksanaan Islamic Solidarity Games III (InaISGOC) tahun 2013 silam bisa terwujud.

Struktur ekonomi Provinsi Banten yang banyak ditopang oleh industri pengolahan menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki keunggulan bagi tumbuh kembangnya sektor industri. Keberadaan industri dapat dioptimalkan untuk mengatasi terbatasnya sumber pendanaan dalam rangka pembangunan melalui skema pembiayaan Kerjasama pembangunan pemerintah dengan pihak swasta atau pun BUMN. Meski memiliki tingkat elastisitas keuangan yang tinggi, pemerintah Provinsi Banten masih memerlukan peran pihak swasta atau pun BUMN untuk akselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk perwujudan pembangunan infrastuktur atau

pun fasilitas pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat.

Praktek kerjasama pembangunan pemerintah dengan badan swasta atau BUMN dapat diwujudkan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau CSR yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Meski sudah memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan namun dalam prakteknya belum berjalan secara optimal. Selama ini kerjasama swasta yang ada belum selaras dengan pencapaian target perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan kemauan bersama dari pihak swasta/BUMN yang berdomisili di wilayah Provinsi Banten untuk melaksanakan kerjasama sejalan dengan target dokumen perencanaan Provinsi Banten. Selain itu pihak pemerintah Provinsi Banten atau pun kabupaten/kota lainnya di wilayah ini harus senantiasa berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya sektor industri sehingga hubungan simbiosis mutualisme bisa terwujud.

Terkait daya saing ekonomi, perubahan pola pembangunan dengan asas desentralisasi sebagaimana disebutkan sebelumnya memberikan konsekuensi penggalan potensi daerah melalui pendirian BUMD dan optimalisasi peran BUMD. Oleh sebab itu, entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki fungsi strategis dalam kontribusinya membangun Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, program-program kerja BUMD harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah agar terjadi sinergitas yang baik dalam mencapai sasaran tujuan pembangunan daerah (Prastiwi, 2016).

Pengoptimalan peran BUMD salah satunya adalah dengan melakukan penanaman modal (Investasi) oleh pemerintah daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah. Investasi tersebut menjadi penting mengingat dalam era otonomi daerah, salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumbangsih deviden yang dihasilkan dari penanaman modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah.

Besarnya potensi ekonomi daerah (pariwisata, pertanian dalam arti luas, dan pertambangan) dan pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten (sport centre dan TPST Regional) merupakan nilai tambah yang harus ditindaklanjuti dengan kebijakan pembentukan badan usaha baru yang strategis dan selaras dengan visi misi Gubernur.

3. Isu Strategis Kemiskinan dan Pengangguran

Persentase tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Banten sebenarnya sudah menunjukkan nilai yang cukup menggembirakan. Data BPS Provinsi Banten, pada Bulan Maret 2018 persentase penduduk miskin Banten mencapai 5,24% jauh di Bawah nilai nasional yang mencapai 9,82% pada periode yang sama. Meski demikian, sebagai musuh Bersama sehingga masuk dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) karenanya kemiskinan tetap menjadi prioritas untuk ditanggulangi.

Fenomena lainnya berkaitan dengan kemiskinan adalah masih banyaknya petani gurem (kepemilikan lahan dibawah 0,5Ha) yang berimbas pada rendahnya pendapatan produktivitas yang mereka peroleh. Hasil kerja mereka bahkan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pokok sekalipun yang ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP) di bawah 100. Permasalahan lainnya adalah adanya praktek tengkulak yang mempermainkan harga komoditas pertanian disaat musim panen tiba. Kondisi ini dapat diantisipasi melalui pembentukan Badan Usaha yang bisa berpihak kepada para petani dengan memberikan jaminan pemasaran hasil panen dengan harga yang kompetitif.

Berbeda dengan kemiskinan, prestasi Provinsi Banten dalam penanggulangan pengangguran masih menyisakan pekerjaan rumah. Tingkat pengangguran di wilayah ini selalu berada diatas rata-rata tingkat pengangguran nasional. Keberadaan industri belum bisa berperan dalam penyerapan tenaga kerja namun sebaliknya menjadi gula bagi pendatang untuk mengadu nasib para pendatang ke wilayah Banten. Kondisi inilah yang menjadi penyebab tingginya pengangguran.

4. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten memperoleh nilai 51,12 atau predikat CC pada tahun 2015. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Banten belum menunjukkan hasil yang cukup memadai dan masih memerlukan banyak perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Rincian penilaian LAKIP Tahun 2016-2018

NO	KOMPONEN YANG DINIAI	2016		2017		2018	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	17,72	30	18,46	30	18,56
2	Pengukuran Kinerja	25	11,17	25	10,01	25	14,09
3	Pelaporan Kinerja	15	9,34	15	9,54	15	9,54
4	Evaluasi Internal	10	6,05	10	6,22	10	6,33
5	Capaian Kinerja	20	11,59	20	11,67	20	11,69
Nilai Hasil Evaluasi		100	55,87	100	55,90	100	60,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC		CC		B

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perencanaan kinerja memiliki bobot penilaian yang paling besar yakni 30%. Salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan awal dalam penyusunan perencananaan di daerah adalah dokumen RPJMD yang menjadi rujukan bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan.Dalam perjalanannya RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 yang telah ditetapkan memiliki beberapa kekurangan dalam penetapan indikator tujuan dan sasaran. Karena itu diperlukan penyempurnaan sehingga indikator capaian tersebut memenuhi kaidah specific, measurable, achievable, reliable dan time bonded (SMART).

5. Isu Strategis Kebencanaan

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor

non alam dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografi, Provinsi Banten merupakan daerah yang sangat rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam dan manusia. Potensi bencana yang bisa terjadi meliputi : Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, gempa bumi, tsunami, kegagalan teknologi, wabah penyakit, bahaya industri, letusan gunung berapi (G. Anak Krakatau), hama tanaman, dan konflik sosial.

Dilihat dari Potensi bencana di Provinsi Banten yang relatif tinggi baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian, peran masyarakat dianggap penting seperti diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu perubahan pendekatan tanggap darurat menjadi pengurangan resiko bencana. Upaya para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mempengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur. Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan tantangan bagi para pemangku kepentingan agar dampak negatif bencana dapat diminimalisasikan.

Pengkajian risiko bencana yang dilakukan untuk tahun 2015, pencatatan sejarah kejadian bencana diambil berdasarkan pencatatan kejadian bencana yang telah dimuat dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2011 yang mencatat kejadian bencana-bencana yang terjadi dari tahun 1999-2011 dan ditambahkan dengan pencatatan kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dari tahun 2012-2015.

Tabel 4.13
Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Banten Tahun 1999-2015

NO	KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN	KERUSAKAN LAHAN (Ha)
1	BANJIR	63	15	39	96	83.916	526	61	13.451
2	KEKERINGAN	19	-	-	-	-	-	-	11.690
3	CUACA EKSTRIM	14	3	48	-	55	37	429	-
4	TANAH LONGSOR	13	3	12	-	90	3	-	-
TOTAL KEJADIAN		109	21	99	96	84.061	566	490	25.141

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel diatas memperlihatkan 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi dan memberikan dampak, untuk jenis bencana lainnya seperti banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi serta kebakaran hutan dan lahan tercatat di DIBI namun tidak memberikan dampak yang berarti.

Kejadian terakhir gempa dan tsunami di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018, sangat berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda yang menghantam daerah pesisir Banten, sedikitnya 317 orang tewas, 709 orang terluka, 24.796 orang mengungsi serta 3 orang hilang akibat peristiwa ini.

Tabel 4.14
Korban Jiwa akibat Tsunami

Kabupaten	Meninggal	Mengungsi	Luka-luka	hilang
Pandeglang	296	22.811	675	3
Serang	21	1985	34	-
Jumlah	317	24.796	709	3

Sumber : BPBD Provinsi Banten, 2019

Bencana juga menimbulkan kerusakan bangunan, baik rumah tinggal, hotel/villa, kendaraan maupun perahu nelayan. Tercatat 1.581 rumah rusak, 37 hotel dan villa rusak, 108 kendaraan roda empat rusak, 95 kendaraan roda dua rusak, 102 perahu rusak.

Tabel 4.15
Kerusakan bangunan dan kendaraan akibat Tsunami

Kabupaten	Rumah	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2	Perahu	Hotel/Villa
Pandeglang	1.039	68	87	56	25
Serang	41	40	8	46	12
Jumlah	1.080	108	95	102	37

Sumber : BPBD Provinsi Banten, 2019